

KOS-KOSAN PER JAM MERESAHKAN

SERANG, BANPOS – Keberadaan rumah kos-kosan yang menerapkan tarif penyewaan Kawan per jam, kina marak di Kota Serang. Hal ini menjadi perhatian publik karena rentan dijadikan tempat aktivitas negatif yang meresahkan.

Pemerhati sosial di Kota Serang, A Iswandi mengungkapkan, beberapa rumah kos-kosan telah berubah fungsi. Penyebabnya, mereka yang tadinya menyewakan kamar dengan minimal penyewaan per bulan, kini telah mem-

buka tarif penyewaan per jam.

Dia menyebutkan, kamar kosan dengan tarif per jam itu kini makin banyak dipublikasikan melalui sosial media. Mereka menawarkan penyewaan *short time* dengan tarif per jam, layaknya se-

buah motel atau hotel transit.

“Banyak sekali seliweran di akun-akun *Facebook*, dari Cipocok, Taktakan, hingga di Ciracas. Ahkan di Tengah kota juga ada,” kata Atet.

BACA **KOS-KOSAN** HAL - 9

PWI 6 Henggang Tidak Pengaruhi Investasi Daerah

Dewan Minta Usut Tuntas PHK Lebak



Musa Weliansyah

SERANG, BANPOS - Henggangnya PT Parkland World Indonesia (PWI) 6 dari Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak menuai sorotan tajam dari pihak legislatif di Provinsi Banten. Pasalnya, PT PWI 6 diduga keluar lantaran adanya gangguan dari sejumlah oknum yang membuat pihak investor merasa terganggu.

Anggota DPRD Provinsi Banten, Musa Weliansyah menegaskan bahwa dugaan keterlibatan oknum yang disampaikan Bupati Lebak, Hasbi Jayabaya harus diusut secara tuntas dan terbuka. Sebab, kata dia, henggangnya perusahaan tersebut mengakibatkan ribuan masyarakat kini harus kehilangan pekerjaannya.

“Jadi pemerintah tidak boleh tinggal BACA **DEWAN** HAL - 9

PEMBAYARAN KERUGIAN KMP BATUMANDI CAPAI RP1,39 MILIAR



Windy Andale

SERANG, BANPOS - Klaim asuransi atau ganti rugi bagi sebanyak 420 korban Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Batumandi hingga saat ini telah mencapai Rp1,39 miliar. Proses klaim tersebut hingga kini masih berlanjut oleh karena pengajuan pembayaran belum rampung sepenuhnya.

Corporate Secretary PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (AS-DP) Indonesia Ferry, Windy Andale mengatakan, hingga saat ini proses klaim asuransi masih berjalan dan belum selesai sepenuhnya. Berdasarkan data yang ada, kata dia, proses klaim asuransi yang sudah terbayarkan sekira Rp1,39 miliar.

“Pembayaran klaim telah mencapai BACA **PEMBAYARAN** HAL - 9



DZIKI OKTOMAUJIYADI/BANTEN POS

PENCAIRAN ASURANSI KMP BATUMANDI

Foto udara KMP Batumandi yang terbakar di Perairan Selat Sunda beberapa waktu lalu. PT Jasa Raharja Putera Cabang Serang mencatat realisasi pencairan klaim asuransi bagi penumpang korban kebakaran Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Batumandi telah mencapai Rp1,39 miliar.

Vox Populi



Edwin Mahesa Pardede
WARTAWAN BANTEN POS

Pembatasan InfoPKB, Siapa Yang Dilindungi?

SETIAP hari, ratusan bahkan jutaan roda berputar di atas jalanan di Provinsi Banten. Provinsi yang memiliki julukan sebagai Tanah Jawara. Mulai dari sepeda motor tua milik buruh harian, hingga mobil mewah keluaran terbaru milik para pejabat dan pengusaha dan juga kendaraan dinas yang merupakan aset pemerintah. Semua melintas di jalan yang sama.

Dan dari setiap putaran roda itu, ada kewajiban yang terus berjalan dan melekat pada setiap kendaraan yakni “Pajak Kendaraan Bermotor”.

BACA **VOX POPULI** HAL - 9

OMBUDSMAN SIAP TAMPUNG ADUAN BPJS WAJIB SOSIALISASIKAN HAK PASIEN

SERANG, BANPOS – Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten, Fadli Afriadi, meminta BPJS Kesehatan dan rumah sakit lebih aktif menyosialisasikan hak-hak pasien. Terutama ketika obat yang dibutuhkan tidak tersedia atau pelayanan menggunakan BPJS Kesehatan terkendala.

Menurut Fadli, masyarakat perlu memperoleh penjelasan yang terang mengenai mekanisme penggantian biaya obat yang harus dibeli di luar rumah sakit, jenis obat yang dijamin, hingga prosedur pelayanan bagi peserta BPJS yang berobat di luar fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) terdaftar.

BACA **BPJS WAJIB** HAL - 9

Menata Hari Setelah Kehilangan Pekerjaan

Oleh: Taufiq Solehudin

HENGKANGNYA PT Parkland World Indonesia (PWI) memberikan pukulan telak bagi dunia ketenagakerjaan di Kabupaten Lebak. Kepergiannya memberikan pengaruh besar bagi kehidupan para mantan pegawainya. Salah satu yang merasakan dampak kepergian itu adalah Elsa Mariana Hutami.

Pagi dan hari-hari Elsa (24) kini tak lagi diisi rutinitas berangkat ke pabrik. Sejak tempatnya bekerja berhenti beroperasi, perempuan asal Kampung Sampay Sarageni, Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, itu lebih banyak menghabiskan waktu di rumah.

Ia membantu ibunya mengerjakan BACA **MENATA** HAL - 9



Suasana PT PWI 6 di Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak yang kini telah henggang. Kepergiannya berdampak pada dirumahnya 1.000 karyawan

PEMKAB SAMBUT BAIK
PENGALIHAN GAJI PPPK KE PUSAT
03

PEMKAB GELONTORKAN
RP7,81 MILIAR
04

DPRD SOROTI EVALUASI
PERUBAHAN APBD 2026
06

MEMBEKALI
GENERASI DIGITAL
07

EVALUASI PEMBATASAN
AKSES INFOPKB
08



LEBAK, BANPOS – Sejumlah armada dump truk dilaporkan memindahkan batu bara dari beberapa lokasi penampungan (stockpile) di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, menuju Panyaungan, Kecamatan Cihara, Selasa (27/10). Pemindahan itu diduga dilakukan menyusul kabar rencana operasi aparat penegak hukum (APH) terhadap aktivitas pertambangan batu bara yang diduga ilegal.

Seorang warga Bayah berinisial AB mengatakan, pemindahan batu bara dilakukan untuk mengamankan material yang tersimpan di sejumlah lokasi. Informasi mengenai rencana operasi aparat di-

Diduga Hindari Operasi, Batu Bara di Bayah Dipindahkan

sebut menjadi alasan percepatan pemindahan tersebut. “Katanya mau ada operasi dari APH di semua stockpile di Bayah. Jadi batu bara itu mau dipindahkan ke Panyaungan,” ungkap AB.

Menurut dia, sejumlah lokasi penampungan yang terdampak antara lain berada di kawasan kebun

karet Gunung Madur, Darmasari, Blok Pasir Bendera, serta lahan Perum Perhutani RPH Bayah Selatan.

AB menuturkan, rantai angkutan batu bara diduga melibatkan sejumlah pihak, mulai dari pemilik lubang tambang, koordinator lapangan, hingga pemilik tempat penampungan. Batu bara

dari lokasi tambang diangkut menggunakan kendaraan sebelum dipindahkan ke dump truk untuk dibawa ke tempat penampungan dan selanjutnya dikirim ke luar daerah.

“Mereka sekarang bergerak cepat mengamankan barangnya. Batu bara yang keluar dari lubang

tambang diangkut menggunakan kendaraan, kemudian dipindahkan lagi memakai dump truk ke stockpile sebelum dikirim ke kota,” katanya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, lokasi penampungan batu bara tersebar di sejumlah titik sepanjang jalur nasional Ma-

lingping-Bayah-Cilograng hingga Cibareno, yang berbatasan dengan wilayah Jawa Barat. Titik-titik tersebut antara lain berada di Cibetot, Pamsel, Pamubulan, Pulomanuk, Darmasari, Bayah, Cimandiri, kawasan pesisir Panggarangan, hingga Panyaungan di Kecamatan Cihara.

Seorang gurandil setempat yang ditanya mengenai pemindahan batu bara tersebut juga membenarkan adanya aktivitas pemindahan. Namun, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan maupun kepastian rencana operasi aparat. “Dipindah dulu, saya kurang tahu, katanya sih akan ada operasi,” ujarnya singkat.(WDO/PAY)

RUANG PUBLIK

Dari Arus Penyeberangan ke Peta Risiko:

Strategi Baru Membendung Narkotika di Koridor Sumatera-Jawa



AKBP Andie Firmansyah, S.E. Kasubdit III Ditresnarkoba Polda Banten, Penggagas Strategi Pengawasan Terpadu Berbasis Risiko Koridor Sumatera-Jawa

penambahan aktivitas pengawasan, melainkan pembenahan cara organisasi mengelola informasi, membaca ancaman, dan mengambil keputusan.

Ancaman Nyata di Jalur Strategis Nasional

Data Bagbinopsnal Ditresnarkoba Polda Banten hingga 20 Agustus 2026 menunjukkan bahwa penanganan perkara narkotika masih menjadi tantangan serius. Dalam periode tersebut, tercatat 117 laporan polisi dengan 171 tersangka, disertai penyitaan berbagai barang bukti, antara lain 76.138,18 gram sabu dan 7.542,41 gram ganja, serta tembakau sintetis dan ribuan butir obat-obatan tertentu.

Pada jalur Bakauheni–Merak, terdapat dua pengungkapan besar dengan barang bukti sabu masing-masing sekitar 15 kilogram dan 52 kilogram.

Data tersebut menyampaikan pesan penting. Penegakan hukum telah bekerja, tetapi besarnya barang bukti yang ditemukan juga memperlihatkan bahwa jalur strategis ini perlu terus mendapat perhatian serius.

Tantangan itu tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan lokal. Survei prevalensi penyalahgunaan narkoba BNN RI periode 2023–2025, sebagaimana tercantum dalam data yang menjadi rujukan tulisan ini, mencatat angka 2,11 persen atau sekitar 4,15 juta penduduk, meningkat dari 1,73 persen pada pengukuran sebelumnya.

Angka tersebut memperkuat urgensi penanganan narkotika secara berkelanjutan. Namun, kita juga perlu memahami bahwa penindakan terhadap pengiriman narkotika dan upaya menekan penyalahgunaan narkoba merupakan bagian dari satu persoalan besar yang membutuhkan pendekatan terpadu.

Jalur transportasi strategis harus dijaga agar tetap mendukung kegiatan ekonomi, tetapi pada saat yang sama tidak menjadi ruang yang mudah dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan.

Ketika Informasi Melimpah, tetapi Belum Menjadi Keputusan

Dalam diagnosis organisasi yang menjadi dasar proyek perubahan ini, persoalan utama bukanlah ketiadaan informasi. Informasi tersedia dari berbagai sumber, baik terkait jalur, modus operandi, waktu pergerakan, maupun sarana angkutan. Masalahnya terletak pada cara informasi tersebut dihimpun, divalidasi, dianalisis, dan ditindaklanjuti.

Perbedaan format pelaporan, tingkat validasi, serta waktu penyampaian informasi dapat menyulitkan penyusunan gambaran risiko yang utuh.

Pemetaan kerawanan juga belum dilakukan secara konsisten, sementara koordinasi lintas fungsi dan lintas wilayah masih membutuhkan pembagian peran serta mekanisme tindak lanjut yang lebih baku.

Di sisi lain, hasil evaluasi pengawasan harus dapat kembali menjadi bahan pembaruan strategi. Tanpa mekanisme tersebut, organisasi berisiko mengulang pola kerja yang sama meskipun modus kejahatan terus berkembang.

Jaringan narkotika tidak bekerja dengan pola yang selalu tetap. Ketika suatu jalur semakin ketat diawasi, pelaku dapat berupaya mencari cara, waktu, atau sarana lain untuk menghindari pemeriksaan.

Karena itu, pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan pengalaman masa lalu. Pengalaman tetap penting, tetapi perlu diperkuat dengan data yang tervalidasi, analisis yang terukur, dan evaluasi yang dilakukan secara berkala.

Informasi baru memiliki nilai strategis ketika mampu mengubah cara kita menentukan prioritas dan mengambil tindakan. Prinsip inilah yang menjadi inti pengawasan berbasis risiko.

Lima Instrumen untuk Menyatukan Langkah

Strategi Pengawasan Terpadu Berbasis Risiko Koridor Sumatera-Jawa dirancang bukan untuk membangun struktur baru atau mengambil alih kewenangan lembaga lain. Tujuannya adalah membuat kewenangan dan sumber daya yang telah tersedia bekerja lebih terkoordinasi.

Untuk mewujudkan, terdapat lima instrumen utama yang disiapkan.

Pertama, pedoman pengawasan terpadu berbasis risiko. Pedoman ini menjadi acuan alur kerja mulai dari pengumpulan informasi, validasi, analisis risiko, penetapan prioritas, pelaksanaan pengawasan, hingga evaluasi. Dengan alur yang jelas, setiap tahapan diharapkan memiliki standar dan keluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, peta risiko koridor Sumatera-Jawa. Peta ini memuat titik rawan, modus, waktu, skor kerawanan, penanggung jawab, serta tanggal pembaruan. Fungsinya bukan sekadar menunjukkan lokasi, tetapi membantu pengambil keputusan memahami perubahan tingkat risiko dan menentukan prioritas pengawasan secara proporsional.

Ketiga, standar informasi prioritas dan prototipe papan pantau digital. Instrumen ini dirancang untuk menyeragamkan format informasi, mekanisme validasi, penanggung jawab, dan batas waktu penyampaian. Dengan demikian, informasi yang

dibutuhkan dapat dikelola lebih tertib dan digunakan secara lebih cepat dalam proses analisis.

Keempat, satuan tugas dan sekretariat bersama pengawasan koridor. Keberadaan unsur ini diharapkan memperjelas koordinasi, pembagian peran, serta tindak lanjut antarpihak. Pertemuan berkala menjadi sarana untuk membahas perubahan risiko, mengevaluasi langkah yang telah dilakukan, dan menyepakati tindakan berikutnya sesuai kewenangan masing-masing.

Kelima, rancangan Keputusan Kapolda Banten. Dokumen ini disiapkan untuk memberikan landasan pengaturan terhadap siklus kerja, pembagian peran, dan indikator kinerja. Keberadaan dasar formal penting agar mekanisme yang dibangun tidak berhenti sebagai kegiatan proyek perubahan atau bergantung pada individu tertentu.

Kelima instrumen tersebut saling berkaitan. Pedoman menetapkan proses, peta risiko membantu menentukan prioritas, standar informasi memperkuat kualitas data, satuan tugas menyatukan koordinasi, dan landasan formal menjaga kesinambungan pelaksanaannya.

Keberhasilan strategi ini tidak semata-mata diukur dari tersusunnya dokumen atau terbentuknya forum koordinasi. Ukuran yang lebih penting adalah apakah informasi dapat ditindaklanjuti dengan lebih tepat, duplikasi pekerjaan berkurang, dan pengawasan menjadi semakin adaptif terhadap perubahan ancaman.

Efisiensi Bukan Tujuan Akhir

Pembenahan sistem kerja juga memiliki dimensi efisiensi. Melalui penyederhanaan alur koordinasi dan pengurangan duplikasi kegiatan administratif, proyek perubahan ini diperkirakan potensi efisiensi nilai ekonomi sekitar Rp74 juta per tahun.

Selain itu, sekitar 500 jam-orang per tahun diperkirakan dapat dialihkan dari kegiatan koordinasi administratif menuju analisis risiko, pengawasan, dan tindak lanjut informasi.

Kedua angka tersebut perlu dipahami secara proporsional. Nilai Rp74 juta merupakan potensi efisiensi sumber daya, bukan penghematan anggaran yang otomatis terealisasi. Demikian pula, 500 jam-orang merupakan perkiraan waktu kerja yang berpotensi dialihkan untuk aktivitas yang lebih strategis, bukan jaminan peningkatan kinerja dengan sendirinya.

Meski demikian, keduanya menunjukkan bahwa perbaikan tata kelola dapat menghasilkan manfaat yang terukur. Waktu dan sumber daya yang sebelumnya

terserap oleh pekerjaan administratif berulang berpotensi digunakan untuk kegiatan yang memberikan nilai lebih besar bagi pelaksanaan tugas.

Pada akhirnya, efisiensi bukan tujuan akhir. Nilai sesungguhnya terletak pada kemampuan organisasi menggunakan sumber dayanya secara lebih tepat tanpa mengurangi kualitas pelayanan, akuntabilitas, maupun efektivitas penegakan hukum.

Kolaborasi Menjadi Kunci

Pengawasan koridor Sumatera-Jawa tidak dapat berjalan optimal jika setiap unsur bekerja sendiri-sendiri. Mobilitas masyarakat melibatkan banyak pihak, sementara jaringan kejahatan dapat melintasi batas wilayah dan memanfaatkan perbedaan pola pengawasan.

Karena itu, koordinasi lintas fungsi dan lintas wilayah harus dibangun berdasarkan pertukaran informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, pembagian peran yang jelas, serta mekanisme tindak lanjut yang disepakati.

Kolaborasi bukan berarti mencampurkan kewenangan. Sebaliknya, setiap pihak harus bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya, dengan tetap terhubung dalam kerangka pengawasan yang memiliki tujuan bersama.

Prinsip ini juga penting untuk menjaga keseimbangan antara keamanan dan kelancaran transportasi. Pengawasan berbasis risiko tidak berarti setiap penumpang atau kendaraan diperlakukan sebagai ancaman. Pendekatan ini justru diarahkan agar perhatian dan sumber daya pengawasan dapat diprioritaskan secara proporsional berdasarkan informasi yang relevan dan tervalidasi.

Dengan demikian, masyarakat yang melakukan perjalanan secara sah tetap dapat beraktivitas, sementara upaya pencegahan dan penindakan diarahkan pada risiko yang memerlukan perhatian lebih besar.

Dari Proyek Perubahan Menjadi Sistem Berkelanjutan

Tantangan berikutnya adalah memastikan strategi ini tidak berhenti setelah rangkaian pelatihan dan proyek perubahan selesai.

Siklus pengawasan berbasis risiko perlu dijalankan secara rutin oleh satuan tugas, disertai pembaruan peta risiko secara berkala. Komitmen antarpihak juga diarahkan untuk diperkuat melalui perjanjian kerja sama resmi sesuai kewenangan masing-masing.

Pada saat yang sama, prototipe papan pantau digital perlu dikembangkan menjadi sarana pemantauan yang lebih fungsional, dengan tetap memper-

hatikan validitas informasi, keamanan data, pengaturan akses, dan akuntabilitas penggunaannya.

Dalam jangka panjang, penguatan landasan kebijakan diarahkan menuju Peraturan Kapolda. Alokasi sumber daya pengawasan juga diharapkan semakin mempertimbangkan prioritas risiko. Apabila implementasinya menunjukkan hasil yang terukur dan dapat dievaluasi, model ini berpotensi direplikasi pada koridor rawan lainnya serta diusulkan kepada Markas Besar Polri sebagai model pengawasan antarwilayah.

Namun, keberlanjutan tidak cukup dijamin oleh regulasi. Sistem harus memiliki indikator kinerja yang jelas, mekanisme evaluasi yang konsisten, dan ruang perbaikan berdasarkan pengalaman pelaksanaan.

Strategi yang baik bukan strategi yang menganggap dirinya telah selesai, melainkan strategi yang terus belajar dari perubahan ancaman.

Membaca Risiko Sebelum Terlambat

Pada akhirnya, menjaga koridor Sumatera-Jawa dari ancaman peredaran gelap narkotika bukan hanya soal memperketat pemeriksaan. Ini adalah persoalan bagaimana negara menggunakan informasi, mengelola sumber daya, dan menyatukan langkah tanpa menghambat mobilitas masyarakat yang sah.

Kita tidak dapat mengandalkan pendekatan yang semata-mata bergerak setelah suatu peristiwa terjadi. Penegakan hukum tetap harus tegas, tetapi pengawasan juga perlu memiliki kemampuan membaca risiko, mengenali perubahan pola, dan menentukan prioritas sebelum ancaman berkembang menjadi kejadian.

Strategi Pengawasan Terpadu Berbasis Risiko Koridor Sumatera-Jawa berangkat dari pemahaman tersebut. Yang dibangun bukan sekadar instrumen administrasi, melainkan cara kerja yang menghubungkan informasi dengan keputusan, keputusan dengan tindakan, serta tindakan dengan evaluasi.

Sebab, keberhasilan pengawasan tidak selalu ditentukan oleh seberapa banyak pemeriksaan dilakukan. Keberhasilan juga ditentukan oleh seberapa tepat risiko dikenali, seberapa cepat informasi ditindaklanjuti, dan seberapa konsisten setiap unsur bekerja dalam satu arah.

Di koridor yang menghubungkan dua pulau besar ini, pengawasan harus tetap menjaga kelancaran perjalanan masyarakat, tetapi tidak boleh kehilangan kewaspadaan terhadap kejahatan. Kita perlu bergerak bukan hanya ketika peristiwa terjadi, melainkan karena risiko telah terbaca dan membutuhkan tindakan.

Itulah perubahan paradigma yang ingin dibangun: dari pengawasan yang cenderung reaktif menuju pengawasan yang terukur, terpadu, adaptif, dan berbasis risiko.*

BANTEN POS

Inspirasi dan Semangat Baru Banten

PEMBINA

Kiki Iswara Dharmayana

KOMISARIS UTAMA

Karim Paputungan

KOMISARIS

Maria Hanief

DIREKTUR

Rumi Nugraha dan M. Fahmi

PT BANTEN BERITA MERDEKA

Kantor: Ruko RDM, Jln. TB Suwandi/Lingkar Selatan

Blok D, No.3, Kota Serang, Banten

Telephon/Fax: (0254) 407 8285

No. Rek: Bank BJB - 0018 21501 2001

BCA -2454 061 704

(a/n PT. BANTEN BERITA MERDEKA)

Percetakan:

WAHANA SEMESTA INTERMEDIA

Jl. Jampang No. 99A, Bekasi. Telp: 0811 1071 633

DEWAN REDAKSI: Kiki Iswara Darmayana, Ratna Susilowati, M. Fahmi, Saepudin, Chandra Magga

JAWAB: Chandra Magga

REDAKTUR PELAKSANA: Azmart Tusnedi

REDAKTUR: Ghuroofie Dzhillilhub, Stefano, Dedi Rustandi

SEKRETARIS REDAKSI: Cahya Andini

REPORTER: CH Widodo Haidar, Dede Suhada, Suganda, M. Wahyu, Taufiq Solehudin, Edwin Mahesa Pardede, Aceng Murto

PENGEMBANGAN BISNIS: Sobar Rohmat

IKLAN: Zulfia Nadira (Manager), Dody Fitriadi

FOTOGRAFER: Dziki Oktomaulyadi

PRA CETAK & PERWAJAHAN: Supriadi (Manager), Fauzi Sandi, M Sy Ian Sangadji

GRAFIS: Ahmad Bukhori

ACCOUNTING: Ifroh Hardianti

ADMINISTRASI KEUANGAN: Azi Abdurrohman

ADMINISTRASI PAJAK: Nadia Al Vani

ADMINISTRASI: Nia Aryanti

PEMASARAN: Eply Wahyudi

PERWAKILAN TANGERANG :

Komplek Green Garden Blok A-1, No. 2

Jalan MH Thamrin, Kota Tangerang, Banten

PERWAKILAN JAKARTA :

Gedung Graha Pena, Lantai 5

Jalan Kebayoran Lama No.12,

Jakarta Selatan

Telp/Fax: 021 - 53699624

PERCETAKAN :

PT. WAHANA SEMESTA INTERMEDIA

TARIF IKLAN

TARIF IKLAN		ADVERTORIAL	IKLAN CILIK/BARIS Rp. 23.000/baris - Minimal 3 baris - Maksimum 7 baris
Hitam Putih (BW)	: Rp. 47.000/mm kolom	Hitam Putih (BW)	
Warna (FC)	: Rp. 69.000/mm kolom	Warna (FC)	: Rp. 69.000/mm kolom
SOSIAL/KELUARGA		Hitam Putih (BW)	: Rp. 30.500/mm kolom
Hitam Putih Hal. 1	: Rp. 91.000/mm kolom	Warna (FC)	: Rp. 54.500/mm kolom
Warna Hal. 1	: Rp. 134.000/mm kolom		

WARTAWAN BANTEN POS SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APAPUN DARI NARASUMBER

KOTA BADAK



Kepala DKUPP Kabupaten Pandeglang, Rd Goenara Daradjat.

Dari 125 Gerai KDKMP Baru 10 Beroperasi

DARI 125 gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang telah selesai dibangun di Kabupaten Pandeglang, baru 10 unit yang beroperasi dan melayani transaksi jual beli. Gerai tersebut mulai menyediakan kebutuhan pokok, sembako, barang harian, hingga kebutuhan rumah tangga bagi masyarakat.

Kepala Dinas Koperasi, UMMK, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUPP) Kabupaten Pandeglang, Rd Goenara Daradjat, mengatakan 10 gerai yang telah beroperasi itu tersebar di sejumlah kecamatan. Tiga di antaranya berada di Kecamatan Cimanggu. "Gerai KDKMP yang sudah melakukan transaksi ini tersebar di beberapa kecamatan. Tiga di antaranya di Kecamatan Cimanggu," kata Goenara kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan, penetapan gerai yang sudah beroperasi berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sesuai arahan Kementerian Koperasi. DKUPP Pandeglang telah melakukan verifikasi dan validasi terhadap 67 unit gerai.

Sementara itu, dari sisi pembangunan, sebanyak 125 gerai dilaporkan telah selesai dibangun dan 41 unit lainnya masih dalam proses pengerjaan. Gerai yang belum beroperasi diharapkan dapat menyusul secara bertahap setelah memenuhi kesiapan operasional. Goenara menambahkan, peluncuran resmi KDKMP di Kabupaten Pandeglang masih menunggu pemberitahuan dari Kementerian Koperasi. "Adapun untuk launching secara resmi masih menunggu pemberitahuan dari Kementerian Koperasi," ujarnya.(DHE/PAY)

PANDEGLANG, BANPOS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang berharap wacana pengalihan pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mulai 2027 dapat mengurangi tekanan terhadap keuangan daerah. Pasalnya, belanja pegawai di lingkungan Pemkab Pandeglang saat ini masih mencapai 41 persen, melampaui batas maksimal 30 persen yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pandeglang, Asep Rahmat, mengatakan pemerintah daerah menyambut positif wacana tersebut. Namun, Pemkab masih menunggu regulasi teknis dari pemerintah pusat untuk memastikan mekanisme pengalihan pembiayaan gaji PPPK. "Pemerintah daerah menyambut baik wacana pengalihan pembiayaan gaji PPPK ke pusat, karena belanja pegawai kita saat ini masih mencapai 41 persen," kata Asep kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan, selama belum ada ketentuan resmi, anggaran gaji PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu, masih dimasukkan dalam rancangan APBD 2027. Langkah tersebut dilakukan agar kebutuhan belanja pegawai tetap terakomodasi dalam perencanaan keuangan daerah. "Regulasi teknis dari pusat masih kita tunggu, sehingga dalam paripurna nota kesepakat APBD 2027 mendatang kita tetap alokasikan dahulu di daerah," ujarnya.

Wacana pengalihan pembiayaan itu sebelumnya dikaitkan dengan alokasi anggaran khusus sebesar Rp23 triliun dalam APBN 2027 untuk membiayai gaji PPPK daerah, dengan prioritas tenaga pendidik dan kesehatan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian pembayaran gaji pegawai sekaligus mengurangi beban anggaran pemerintah kabupaten dan kota.

Di Pandeglang, jumlah PPPK paruh waktu tercatat sekitar 5.683 orang. Dengan honorarium rata-rata Rp500.000 per bulan, kebutuhan anggaran untuk kelompok pegawai tersebut mencapai sekitar Rp2,5 miliar setiap tahun. Besarnya belanja pegawai menjadi salah satu tantangan bagi Pemkab Pandeglang dalam menjaga keseimbangan anggaran. Jika pembiayaan gaji PPPK benar-benar dialihkan ke pemerintah pusat, daerah berpeluang memiliki ruang fiskal lebih besar untuk membiayai kebutuhan pembangunan.

Asep berharap, pengalihan tersebut dapat membantu menurunkan rasio belanja pegawai hingga memenuhi batas maksimal 30 persen dari total APBD. Dengan demikian, anggaran daerah dapat lebih luasa diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. "Apabila pembiayaan gaji ditarik ke APBN, anggaran daerah bisa dialihkan secara maksimal untuk membiayai pembangunan fasilitas publik," katanya.(DHE/PAY)

Pembangunan Sekolah Rakyat Gunakan Teknologi BIM



Gedung SR di Kabupaten Pandeglang, dan Lebak menggunakan teknologi Digital Mutakhir.

PANDEGLANG, BANPOS – Pembangunan dua Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak menerapkan teknologi Building Information Modeling (BIM) untuk meningkatkan ketepatan perencanaan, efisiensi konstruksi, dan transparansi pelaksanaan proyek. Teknologi ini memungkinkan proses pembangunan dipantau melalui pemodelan digital yang mencakup desain bangunan, jadwal pekerjaan, hingga perhitungan kebutuhan material.

Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Banten, Astri Paramitha, mengatakan penerapan BIM merupakan bagian dari persyaratan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam pembangunan fasilitas pendidikan tersebut. "Penerapan BIM meliputi dimensi 3D Modeling, 4D Schedule dan Monitoring, serta 5D Quantity Take Off material," kata Astri kepada wartawan, Selasa (27/10).

Humas PT HK-Etona KSO, Febriansyah, menjelaskan pemodelan tiga dimensi (3D) digunakan untuk memvisualisasikan bentuk bangunan sekaligus mengidentifikasi potensi kesalahan desain sebelum pekerjaan dilaksanakan. Data tersebut kemudian dikembangkan untuk memantau jadwal dan realisasi pekerjaan melalui persyaratan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.

modelan empat dimensi (4D). Menurut Febriansyah, teknologi BIM juga mencakup dimensi lima (5D) yang digunakan untuk menghitung volume kebutuhan material dan pekerjaan secara terperinci. Data tersebut menjadi acuan dalam penyusunan perhitungan pekerjaan, pemesanan material, pengukuran progres, hingga perhitungan akhir proyek. "Data tersebut dapat dimanfaatkan sebagai 5D Quantity Take Off, sehingga keseluruhan volume pekerjaan struktur, arsitektur, dan MEP dapat dihasilkan sebagai acuan perhitungan yang akurat dan meminimalkan human error," ujarnya.

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 Undang – Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 PT. Oke Asset Indonesia Akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Tangerang II melalui jasa pra lelang PT. Balai Lelang Sempurna, dengan cara penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang (open bidding) terhadap jaminan debitur atas nama **DANI SAPUTRA** berupa :

- Sebidang tanah seluas 129 m² sesuai SHM No. 6205/Cibodas Baru terdapat atas nama **DANI SAPUTRA** berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jl. Empu Sendok IV No. 1 (sesuai sertifikat) Jalan Empu Sendok IV No. 01 RT/RW 003/003, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas (di Kecamatan Jatitujuh), Kota Tangerang, Provinsi Banten

Harga limit Rp. 604.000.000,- ; Setoran Jaminan Rp. 120.800.000,-

Cara Penawaran	: Penawaran terbuka (Open bidding)
Waktu Penawaran	: Sejak tayang pada Aplikasi Lelang s.d. batas akhir penawaran
Hari/Tanggal	: Rabu, 11 November 2026
Batas Akhir Waktu Penawaran	: 11 November 2026 Pukul 10:30 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain	: https://lelang.go.id/
Tempat Lelang	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang II Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna, Kota Tangerang, Provinsi Banten
Penetapan Pemegang Pelunasan Harga Lelang	: Setelah batas akhir penawaran
Bea Lelang Pembeli	: 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang Apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan wanpretasi, uang jaminan lelang tidak bisa dimintakan kembali dan akan disetorkan ke Kas Negara
PPN Pembeli	: 2% (dua persen) dari harga lelang
BPHTB	: Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 41 Tahun 2023, Pemegang Lelang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,1 % (satu koma satu persen) dari nilai laku Lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampung PT. Oke Asset Indonesia paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang

Uang jaminan lelang dapat melihat objek yang akan dilelang sejak diterbitkannya pengumuman lelang dan dapat menghubungi PT.Balai Lelang Sempurna Telepon 0822 2564 4697 / 0822 4960 8588.

Jakarta, 28 Oktober 2026

Ttd.

KPKNL Tangerang II PT. Oke Asset Indonesia PT Balai Lelang Sempurna

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Office Labuan yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 156 Labuan, Pandeglang - Banten akan melaksanakan penjualan di muka umum/lelang eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang terhadap jaminan pinjaman atas nama **Nia Nulaningih** sebagai berikut :

- 2 (dua) bidang tanah luas total 154 M² berikut bangunan berdiri diatasnya dijual sepakat satu kesatuan masing-masing sesuai SHGB No.00942/Saruni seluas 56 M² an. **Jumrani** dan SHGB No. 1128/Saruni seluas 98 M² an. **Jumrani** terletak dalam satu hamparan di Perumahan Griya Puspita Cenggang Blok A Kav. No. 4 RT.01 RW.05, Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten

Harga Limit Rp. 200.000.000,- dengan setoran uang jaminan Rp. 40.000.000,-

Syarat-syarat lelang :

- Cara penawaran lelang dilaksanakan dengan penawaran secara terbuka (open bidding) tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan aplikasi yang diakses pada alamat domain <https://lelang.go.id/>. Tata cara mengikuti dapat dilihat di menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada domain tersebut.
- Calon peserta mendaftarkan dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dan merekam serta mengunggah softcopy KTP dan memasukan data NPWP serta nomor rekening atas nama sendiri
- Waktu Pelaksanaan : Penawaran lelang diajukan melalui alamat domain di atas sejak pengumuman lelang ini terbit sampai dengan :

Hari / Tanggal	: Rabu, 11 November 2026
Waktu Penawaran	: Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran	: 11 November 2026 Pukul 14:30 Waktu Server e-Auction (WIB)
Tempat Lelang	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang Jalan Raya Serang-Cilegon KM.3 Kota Serang

Alamat Domain : <https://lelang.go.id/>

Peserta lelang diharap menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut.

- Uang Jaminan Lelang :
 - a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan :
 - Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama persis dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini dan disetorkan sekali dan sekaligus
 - Setoran uang jaminan lelang harus sudah efektif diterima KPKNL Serang selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum penutupan penawaran lelang
 - b. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid
- Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit dan dapat dikirim berkali-kali.
- Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang 2% secara tunai atau cek/giro paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
- Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Perda dimana objek lelang berada
- Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Office Labuan No. Telp : (0253) 801035, 801214, 802800, 801761 - atau KPKNL Serang No. Telp (0254) 216361

Labuan, 28 Oktober 2026

Ttd

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk Branch Office Labuan

BANK BRI

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Office Labuan akan melaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang terhadap jaminan pinjaman atas nama **Jajang Sujana** sebagai berikut :

- 2 (dua) bidang tanah terletak dalam satu hamparan dengan luas total 910 M² berikut bangunan berdiri diatasnya masing-masing sesuai SHM No. 00149/Pangkal seluas 420 M² dan SHM No. 00150/Pangkal seluas 390 M² keduanya tercatat atas nama Jajang Sujana terletak di Kp. Gokat Jalan Raya Sobang - Cigeulis RT. 02 RW. 01 Desa/Kelurahan Pangkalan, Kecamatan Sobang (dh. Cigeulis), Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten (dh. Jaja Barat).

Harga Limit Rp. 350.000.000,- dengan setoran uang jaminan Rp. 70.000.000,-

Syarat-syarat lelang :

- Cara penawaran lelang dilaksanakan dengan penawaran secara terbuka (open bidding) tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan aplikasi yang diakses pada alamat domain <https://lelang.go.id/>. Tata cara mengikuti dapat dilihat di menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada domain tsb.
- Calon peserta mendaftarkan dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dan merekam serta mengunggah softcopy KTP dan memasukan data NPWP serta nomor rekening atas nama sendiri
- Waktu Pelaksanaan :
 - Tanggal : Rabu, 11 November 2026
 - Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
 - Batas Akhir Penawaran : 11 November 2026 Pukul 11:00 Waktu Server e-Auction (WIB)
 - Tempat Lelang : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pandeglang, Jl. Bhayangkara No. 1 Pandeglang

Alamat Domain : <https://lelang.go.id/>

Penetapan Pemegang : Setelah batas akhir penawaran

- a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan jumlah/nominal yang disetorkan harus sama persis dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini dan disetorkan sekali dan sekaligus efektif diterima KPKNL Serang selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum penutupan penawaran lelang
- b. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid

- 5. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit dan dapat dikirim berkali-kali.
- 6. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang 2% secara tunai atau cek/giro paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
- 7. Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Perda dimana objek lelang berada
- 8. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Office Labuan No. Telp : (0253) 801035, 801214, 802800, 801761 - atau KPKNL Serang No. Telp (0254) 216361

Labuan, 28 Oktober 2026

Ttd

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk Branch Office Labuan

BANK BRI

PENGUMUMAN LELANG ULANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Menunjuk Pengumuman Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan pada surat kabar harian Banten Pos tanggal 30 September 2026 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Office Labuan yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 156 Labuan, Pandeglang - Banten akan melaksanakan lelang ulang eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang I terhadap jaminan pinjaman atas nama **CV. Pranaja Pratama** sebagai berikut :

- 1. 1 (Satu) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya sesuai **SHM No.01903/Suradita** seluas 60 M² atas nama **Hazlin Juansyah** yang terletak di Blok Catalia 1 No.1, Kelurahan Suradita, Kecamatan Cisaug, Kab. Tangerang, Provinsi Banten

Harga limit sebesar Rp. 200.000.000,- dengan setoran uang jaminan Rp. 40.000.000,-

Syarat-syarat lelang :

- a. Peserta lelang dilaksanakan dengan penawaran secara terbuka (open bidding) tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan aplikasi yang diakses pada alamat domain <https://lelang.go.id/>. Tata cara mengikuti dapat dilihat di menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada domain tersebut.
- Calon peserta mendaftarkan dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dan merekam serta mengunggah softcopy KTP dan memasukan data NPWP serta nomor rekening atas nama sendiri
- Waktu Pelaksanaan : Penawaran lelang diajukan melalui alamat domain di atas sejak pengumuman lelang ini terbit sampai dengan :

Hari / Tanggal	: Rabu, 04 November 2026
Waktu Penawaran	: Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran	: 04 November 2026 Pukul 10:20 Waktu Server e-Auction (WIB)
Tempat Lelang	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Tangerang I, Jl. Taman Makam Pahlawan Taruna, Sukasih, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten

Alamat Domain : <https://lelang.go.id/>

Penetapan Pemegang : Setelah batas akhir penawaran

Peserta lelang diharap menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut.

- Uang Jaminan Lelang :
 - a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan :
 - Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama persis dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini dan disetorkan sekali dan sekaligus
 - Setoran uang jaminan lelang harus sudah efektif diterima KPKNL Tangerang I selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum penutupan penawaran lelang
 - b. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid
- Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit dan dapat dikirim berkali-kali.
- Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang 2% secara tunai atau cek/giro paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
- Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Perda dimana objek lelang berada
- Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Office Labuan No. Telp : (0253) 801035, 801214, 802800, 801761 - atau KPKNL Tangerang I, No. Telp (021) 55794272.

Labuan, 28 Oktober 2026

Ttd

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk Branch Office Labuan

BANK BRI

IKLAN LAPIS

Info Iklan :
- 081334404392
- 087808831183

BANTEN POS

KEHILANGAN

Telah Hilang map biru yang berisi SHM a/n Enny Ambarita jl.Andalar raya 7 Berngam binjai,surat ukur No. 185/ berngam/2002,luas 135 M2,AJB a/n Enny Ambarita dan Bpkb motor a/n Enny Ambarita

Telah Kehilangan 1 Ekslembar Surat Berharga BPKB Sepeda Motor - BPKB R2 NOPOL: A-6101-DZ, Tahun Pembuatan: 2023/2024, Warna: Merah Hitam,

NOKA: MH1JM8124124PK31277, NOSIN: JM81E2317432, WARNA TNKB: PUTIH ATAS NAMA: PELAPOR, Diketahui Hilang pada Tanggal 13Oktober 2026 Pukul 23.00WIB Di jl. Perumahan Waringinkurung, Waringinkurung, Kabupaten Serang Banten

Kehilangan 1 (satu) buku BPKB kendaraan R4 merk Toyota Type Camry 3,5 Q AT, Plat Nomor B 25 JOY. Nomor rangka : MR053KK40A9002293 Nomor Mesin : 2GR0750023 atas nama TAN IE CIAW nomor BPKB :

H05465816

Kehilangan di kantor PT. BAJA PERKASA SENTOSA yang beralamat di Jl. Lanud Gorda KM 1, No. 9, Cikande, Kampung Maja, Kec. Kibin, Kabupaten Serang, Banten 42185

Atas nama pemilik BPKB TAN IE CIAW yang beralamat di jln pluit sakti 4/34 RT.005 RW.007 Kel. Pluit kec. Penjarangan Kota. Jakarta utara Prov. DKI Jakarta HP. 081399356786

Kehilangan: BPKB Dan STNK Mobil Suzuki Futura B 9352 CUB NOSIN : G15AID942107 NOKA : MHYESL415EJ305618 Hub : 085697455893

TELAH HILANG 1 (SATU) EKSELEMPAR SURAT BERHARGA BPKB SEPEDA MOTOR - BPKB R2 Merk Honda Beat Warna Putih Biru Tahun 2016 an. H.SALAMI dengan No. Pol A 6302 CQ No. Rangka MH1JFP128GK780124 No. Mesin JFP1E2761401 yang dikeluarkan oleh sat lantas polresta serang kota

TELAH HILANG SURAT TANAH : Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01447 NIB : 28.04.01.10.02331 Surat Ukur No. 33/PETE / 2008, Luas 60 m2 Desa Pete Kec. Tigarakas Kab. Tangerang Prov. Banten, AN. IBRAMSA.

MAKANAN

Jual/menerima pesanan Bubur Ayam Cianjur dan Lontong Sayur. **alamat:** Lampu merah Perumahan Graha Asri, Ciracas, Kota Serang - Banten Hub: Jejen 0878 7346 4053

WEBSITE www.banpos.co **EMAIL** iklanbantenpos@gmail.com **TWITTER** @bantenpos **INSTAGRAM** banten_pos **FACEBOOK** facebookbantenpos **YOUTUBE** Banpos Channel

MULTATULI

Pengadaan Beras BULOG
Lebak-Pandeglang
Lampau Target 114 Persen

PERUM BULOG Kantor Cabang Lebak-Pandeglang mencatat realisasi pengadaan gabah dan beras sebesar 114 persen dari target wilayah hingga 7 Oktober 2026. Capaian tersebut sejalan dengan realisasi pengadaan beras nasional yang telah menembus 4,1 juta ton atau melampaui target pemerintah sebesar 4 juta ton.

Berdasarkan data BULOG, realisasi pengadaan di wilayah Lebak-Pandeglang mencapai 42.716 ton gabah atau setara 21.849 ton beras. Sementara itu, target yang ditetapkan sebesar 37.501 ton gabah atau setara 19.187 ton beras.

Atas pencapaian tersebut, BULOG Cabang Lebak-Pandeglang menggelar tasyakuran di kantor cabang pada Selasa (27/10). Kegiatan itu menjadi bentuk syukur sekaligus apresiasi kepada pihak-pihak yang mendukung penyerapan hasil panen petani.

Kepala Cabang BULOG Lebak-Pandeglang, M. Syaukani, mengatakan capaian pengadaan beras tidak terlepas dari kerja sama petani, pemerintah, dan mitra kerja yang terlibat dalam proses penyerapan gabah dan beras.

"Alhamdulillah, hari ini kami melaksanakan tasyakuran atas pencapaian pengadaan beras sebanyak 4 juta ton. Ini merupakan capaian yang patut kita syukuri bersama karena tidak terlepas dari kerja keras petani, dukungan pemerintah, serta sinergi seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan pangan nasional," katanya.

Menurut dia, penyerapan hasil panen dalam negeri berperan penting dalam memperkuat cadangan beras pemerintah sekaligus mendukung keberlangsungan produksi pertanian.

Syaukani juga menyampaikan

apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahan dan dukungan dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Apresiasi turut disampaikan kepada Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, TNI-Polri, pemerintah daerah, petani, serta mitra kerja BULOG.

"Capaian ini bukan semata-mata keberhasilan BULOG, melainkan hasil kerja bersama. Kami mengucapkan terima kasih kepada para petani yang terus memproduksi, serta seluruh pemangku kepentingan yang membantu kelancaran penyerapan gabah dan beras di berbagai daerah," ujarnya.

Secara nasional, realisasi pengadaan beras hingga 8 Oktober 2026 tercatat mencapai 4.115.014 ton setara beras. Jumlah tersebut setara 102,88 persen dari target penugasan pemerintah sebesar 4 juta ton.

Capaian itu juga melampaui realisasi pengadaan sepanjang 2025 yang tercatat sebesar 3.191.969 ton setara beras. Data tersebut menunjukkan peningkatan volume pengadaan beras yang dilakukan BULOG dibandingkan tahun sebelumnya.

Syaukani berharap kinerja pengadaan di wilayah Lebak-Pandeglang terus meningkat hingga akhir tahun. BULOG, kata dia, akan melanjutkan penyerapan hasil panen petani dan memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak untuk mendukung ketersediaan pangan.

"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan penyerapan hasil panen petani dan memperkuat sinergi dengan seluruh pihak. Harapannya, ketahanan pangan semakin kokoh dan upaya mewujudkan swasembada pangan nasional dapat berjalan secara berkelanjutan," kata Syaukani.(TQS/RUS)



LEBAK

PEMKAB GELONTORKAN Rp7,81 MILIAR

Untuk Insentif Tenaga Keagamaan

LEBAK, BANPOS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak mengalokasikan dana Rp7,81 miliar untuk insentif tenaga keagamaan pada Tahun Anggaran 2026. Bantuan tersebut menyasar 19.506 penerima yang terdiri atas guru madrasah diniyah, pengajar program Magrib Mengaji, dan pimpinan pondok pesantren.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Lebak, Iyan Fitriyana, menyampaikan bahwa pemberian insentif tersebut merupakan bagian dari dukungan peme-

rintah daerah terhadap pengembangan sektor keagamaan.

Berdasarkan data yang disampaikan, insentif diberikan kepada 5.425 guru madrasah diniyah dengan nominal Rp600.000 per orang. "Total anggaran untuk kelompok penerima ini mencapai sekitar Rp3,25 miliar," katanya, usai mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema "Pengembangan Keagamaan di Kabupaten Lebak" pada Selasa (27/10).

Selanjutnya, sebanyak 12.481 pengajar program Magrib Mengaji

menerima insentif Rp250.000 per orang dengan total anggaran sekitar Rp3,12 miliar. Sementara itu, 1.600 pimpinan pondok pesantren masing-masing memperoleh Rp900.000 atau total Rp1,44 miliar.

Iyan menjelaskan, penyaluran insentif keagamaan tersebut mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya peraturan daerah tentang pendidikan madrasah diniyah dan penyelenggaraan pendidikan pondok pesantren, serta Peraturan Bupati Lebak tentang Gerakan Magrib Mengaji.

Selain itu, terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan terkait penyelenggaraan ibadah haji yang turut disebut sebagai landasan regulasi dalam pemaparan tersebut.

"Bapak Bupati berkomitmen untuk terus meningkatkan pengembangan sektor keagamaan ke depan. Dukungan melalui skema APBD akan tetap diperkuat seiring sinergi yang terus dibangun bersama Kementerian Agama dan pemangku kepentingan terkait," ujarnya.(TQS/RUS)

Saksi Polisi Sebut Mobil Terdakwa Kosong, Benih Lobster Tak Ditemukan

LEBAK, BANPOS - Pengadilan Negeri (PN) Rangkasbitung kembali menggelar persidangan terhadap ketiga terdakwa kasus pencurian disertai kekerasan (Curas) yang melibatkan anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Yandi, Moch Dimas, dan Jon Piter Manurung pada Selasa (27/10). Ketiganya menjalani persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Lebak.

Dalam persidangan tersebut JPU Kejari Lebak, Widyana Valent Asnawi, menghadirkan enam orang sebagai saksi. Mereka di antaranya Denden Supriadi dan Zeni Sumardi selaku pemilik rental mobil. Kemudian Senja Nugraha Rahman (anggota Polsek Bayah), Septian (anggota Polsek Cibeber), lalu Rendi dan Zion selaku saksi korban dalam perkara tersebut.

Dalam prosesnya, sidang pemeriksaan saksi dilaksanakan dalam dua sesi. Hal itu dikarenakan salah satu saksi korban bernama Zion dianggap masih di bawah umur, sehingga majelis hakim memutuskan persidangan dilakukan secara terpisah.

Pada sesi pertama, majelis hakim memulai persidangan dengan mendengarkan keterangan dari saksi Denden Supriadi, Zeni Sumardi, Senja Nugraha Rahman, dan Septian. Persidangan tersebut dilaksanakan secara terbuka untuk umum.

Dalam keterangannya saksi Senja mengaku, laporan mengenai kasus dugaan curas itu diterima Polsek Bayah pada Senin, 25 Mei 2026 sekitar pukul 00.18 WIB. Laporan tersebut diterima dari anggota Polsek Cibeber bernama Septian.

Sebab, sebelumnya, saksi korban mengaku telah mengalami pencurian disertai kekerasan oleh tiga orang pelaku. Adapun barang bukti yang dicuri dalam aksi tersebut yakni, satu unit mobil serta sebuah handphone.

Usai barang tersebut diambil, saksi korban kemudian ditelantarkan dalam keadaan terikat di wilayah Desa Warung Banten, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak

oleh para pelaku. Setelah itu saksi korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cibeber.

Usai menjalankan aksinya, para pelaku berusaha melarikan diri menuju wilayah Kecamatan Bayah. Mendapat informasi tersebut Senja bersama beberapa personel lainnya kemudian berusaha melakukan penghadangan.

Di lokasi Senja mengaku melihat dua unit mobil dengan jenis berbeda: Toyota Calya Putih dan Suzuki R3 Cokelat yang kendarai oleh tiga orang terduga pelaku.

Setelah berhasil melakukan penghadangan, Senja mengaku tidak langsung membawa ketiga terduga pelaku tersebut ke Polsek Bayah. Dia terlebih dahulu memastikan ketiganya adalah pelaku curas kepada Septian dan saksi korban.

"Sebelum dibawa ke Polsek kita tunggu Septian dulu. Kebetulan Septian komunikasi sama pak Restu. Dan kebetulan Rendi dan menyatakan, 'ini orangnya,'" tuturnya.

Kemudian setelah dipastikan ketiganya adalah terduga pelaku, barulah kemudian mereka membawanya ke kantor Polsek Bayah untuk diamankan. Saat pemeriksaan awal di Polsek Bayah, Senja mengatakan, terdakwa Yandi mengaku dugaan aksi curas tersebut tidak sendiri melainkan turut melibatkan pihak lain.

"Kalau ngomongnya nggak sendiri. Kebetulan kita juga melihat ketika di jembatan itu (mobil Suzuki) R3 balik kanan," ujarnya menerangkan.

Namun, kata Senja, untuk penyelidikan lebih lanjut perihal dugaan keterlibatan pihak lain dilakukan oleh Polres Lebak. "Setelah dibawa ke Polres habis itu sudah," terangnya.

Kemudian saat disinggung terkait barang bukti berupa benih lobster yang disebut dibawa oleh korban dan menjadi modus pelaku dalam menjalankan aksinya, Senja mengaku tidak mendapati barang yang dimaksud. Dia mengatakan, saat dilakukan pemeriksaan mobil tersebut dalam keadaan kosong tidak membawa barang apapun.

"Nggak ada apa-apa, kosong," ujarnya.

Usai mendengarkan keterangan tersebut majelis hakim kemudian meminta tanggapan dari para terdakwa. Salah satu terdakwa, Yandi merasa keterangan yang disampaikan saksi ada yang terlewat yakni perihal benih lobster yang dibawa oleh korban.

Sebab, Yandi mengatakan, saat pemeriksaan di Polsek Bayah pihak Kepolisian sempat menyinggung keberadaan barang bukti tersebut. Menanggapi hal tersebut saksi Septian mengaku saat di Polsek Cibeber, dirinya tidak menerima keterangan mengenai keberadaan barang bukti tersebut dari korban.

"Waktu di Polsek Cibeber tidak ada," kata Septian kepada majelis hakim.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Senja. Saat pemeriksaan di Polsek Bayah korban tidak memberikan informasi mengenai keberadaan barang bukti yang dimaksud.

"Saya tanya ke Rendi, 'kamu bawa apa?' (Rendi menjawab) 'saya bawa barang segala macam,' yang difokuskan soal (pencurian) mobil aja kebetulan mobilnya kan mobil rental," terangnya kepada majelis hakim.

Kemudian saat itu pun Senja mengaku tidak mengkonfirmasi barang bukti yang dimaksud kepada terdakwa Yandi. Dirinya hanya fokus terhadap kasus dugaan pencurian mobil yang dilakukan oleh para terduga pelaku.

"Saat diperiksa pun nggak ada apa-apa," ucapnya menambahkan.

Setelah pemeriksaan terhadap keempat saksi tersebut berakhir, majelis hakim kemudian melanjutkan persidangan terhadap saksi korban. Namun, persidangan tersebut dilaksanakan secara terpisah dan tertutup.

Sebagai informasi pada persidangan sebelumnya, JPU Kejari Lebak mendakwa Yandi, Moch Dimas, dan Jon Piter Manurung melakukan aksi pencurian mobil disertai kekerasan di Jalan Raya Cilograng, Kecamatan Cilograng, Ka-

bupaten Lebak. Dalam dakwaan yang disampaikan, aksi itu turut melibatkan dua anggota pria lainnya yang diketahui merupakan anggota BAIS TNI.

Jaksa menerangkan aksi itu bermula ketika para terdakwa bersama sejumlah orang lainnya berkumpul di Hotel Amarta pada 23 Mei 2026 sekitar pukul 18.30 WIB.

Mereka disebut menunggu instruksi dari Dedy Suprianto untuk menghadang Rendi dan Zion Dini. Keesokan harinya, Minggu (24/5), sekitar pukul 20.00 WIB, para terdakwa bersama sejumlah orang lainnya berangkat menuju wilayah Cilograng menggunakan beberapa mobil.

Yandi bersama Dedy mengendarai Toyota Calya berwarna putih, sedangkan Mochamad Dimas Septian dan Jon Piter Manurung menggunakan Suzuki Ertiga berwarna abu-abu metalik.

Sekitar pukul 21.00 WIB, saat tiba di Jalan Raya Cilograng, mereka mendapat informasi bahwa kendaraan yang menjadi target telah terlihat. Ketiga mobil tersebut kemudian menghadang Toyota Rush hitam bernomor polisi B 1378 WMZ yang dikendarai Rendi bersama Zion.

"Mendapat instruksi dari saksi Dedy 'target sudah terlihat', kemudian ketiga mobil tersebut menghadang satu unit kendaraan R4 Toyota Rush warna hitam dengan nomor plat B1378 WMZ yang dikendarai oleh saksi Rendi dan Zion," tuturnya.

Dalam dakwaan itu, JPU mengungkapkan, setelah kendaraan tersebut dihentikan, Rendi dan Zion diminta turun. Dedy kemudian memindahkan Toyota Rush ke bahu jalan.

Jon Piter, Dedy, dan seorang pria bernama Babah yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) lalu memeriksa kendaraan tersebut.

Dari pemeriksaan itu, mereka menemukan satu kantong berisi benih lobster. Barang tersebut kemudian dipindahkan ke Toyota Calya putih.

JPU juga menguraikan dugaan tindakan kekerasan dan intimidasi terhadap kedua korban. Rendi disebut diminta masuk ke Toyota Calya putih, kemudian Jon Piter mengatakan bahwa ada pihak yang melaporkan mobil tersebut membawa narkoba.(TQS/RUS)

Pendaftaran Sepi Peminat

Amal Jayabaya Kembali Maju di Muprov VII KADIN Banten



LEBAK, BANPOS - Musyawarah Provinsi (Muprov) VII Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Banten dipastikan digelar pada Selasa, 3 November 2026.

Hingga batas akhir pendaftaran calon Ketua Umum KADIN Banten pada Selasa, 27 Oktober 2026, hanya M Azzari Jayabaya yang me-

mastikan diri menjadi calon ketua umum pada Muprov VII KADIN Banten periode 2026-2031 yang akan dihelat di Aula Jayabaya, Warunggunung, Kabupaten Lebak.

M Azzari Jayabaya yang dipastikan menjadi calon tunggal Ketua Umum Kadin Banten dalam keterangan yang disampaikan

kepad BANPOS, memaparkan, dirinya menyiapkan 10 program kerja unggulan dalam menahkodai Kadin Provinsi Banten selama lima tahun ke depan.

Berbeda dengan konsep yang normatif, ia menawarkan program yang sangat terperinci, operasional, dan terukur dengan fokus uta-

ma UMKM naik kelas.

Pria yang akrab disapa Amal Jayabaya menekankan KADIN harus menjadi mitra kerja nyata bagi UMKM, hadir dari tahap persiapan hingga perluasan usaha.

"Fokus pertama saya adalah meningkatkan kemampuan dan profesionalisme pelaku UMKM.

Programnya berupa pelatihan pengelolaan usaha, perencanaan bisnis, kelas dasar pencatatan keuangan, pengitungan HPP, pengelolaan arus kas, pemisahan keuangan pribadi-usaha, hingga klinik konsultasi bersama praktisi, akuntan dan konsultan pemasaran yang disesuaikan sektor dan daerah," jelas Amal Jayabaya.

Kedua, memperluas akses pasar dan peluang penjualan.

KADIN akan menjadi penghubung dengan mempertemukan UMKM terkursi dengan perusahaan, industri, perhotelan, restoran, ritel dan distributor, menggali temu bisnis berorientasi transaksi, serta mengembangkan katalog digital produk UMKM Banten.

Ketiga kata dia, menghubungkan UMKM dengan rantai pasok

industri.

Program kunci yang selama ini dinanti pengusaha lokal. Melalui pemetaan kebutuhan perusahaan besar, pembuatan direktori UMKM pemasok berdasarkan sektor dan kapasitas, hingga pertemuan rutin buyer-supplier dan pendampingan pemenuhan standar mutu dan K3.

"Ke-empat, mempermudah akses pembiayaan yang sesuai kebutuhan usaha. Melalui klinik persiapan pembiayaan, pertemuan dengan bank, koperasi, investor, edukasi pilihan pembiayaan, serta pendampingan penggunaan dana yang bertanggung jawab," paparnya.

Kelima sambungnya, mempercepat pemanfaatan teknologi dan digitalisasi usaha.

Bukan hanya promosi, tapi penggunaan alat digital untuk pencatatan keuangan, transaksi, stok, pemasaran digital, pembuatan katalog, foto produk, hingga edukasi keamanan transaksi.

Ke-enam, mendampingi legalitas, standar mutu, dan sertifikasi produk. program ini mencakup pendampingan konsultasi legalitas usaha,

persiapan sertifikasi halal, PIRT, edukasi mutu, kemasan, label, serta penghubungan dengan instansi dan lembaga sertifikasi terkait.

Ketujuh, mengembangkan produk unggulan dan identitas Banten.

Melalui kurasi produk, pendampingan desain dan kemasan, penguatan merek dan perlindungan HAKI, kolaborasi dengan desainer dan perguruan tinggi, serta promosi produk unggulan di pameran.

Kedelapan, membangun kemitraan yang adil dan berkelanjutan. Program ini fokus menyusun panduan dasar kemitraan yang transparan soal mutu, harga, pembayaran, pengiriman, memfasilitasi komunikasi saat kendala, dan membangun kolaborasi pentahelix.

Kesembilan, mendorong wirausaha muda dan perempuan. Ini mendukung kelas kewirausahaan pemula, program mentor pengusaha senior dengan wirausaha muda, forum jejaring pengusaha perempuan, hingga pendampingan uji ide produk.

"Terakhir, mengukur keberhasilan berdasarkan perkembangan usaha.(RUS)

Evaluasi Ketat Porprov Jateng

Keselamatan Atlet Prioritas

SEMARANG, BANPOS - Prosedur keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam setiap pertandingan. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menegaskan hal itu menyusul meninggalnya atlet selam Syabilla Rizkia Putri Raharja. Insiden terjadi saat Syabilla mengikuti Porprov Jawa Tengah 2026 di Semarang.

Erick menyampaikan belasungkawa kepada keluarga Syabilla. Ia mengimbau pemangku kepentingan olahraga menjadikan perlindungan atlet sebagai bagian utama kompetisi. Setiap penyelenggara bertanggung jawab memastikan atlet bertanding di lingkungan aman.

“Tidak ada kemenangan yang lebih berharga daripada nyawa seorang atlet, karena itu setiap stakeholder memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan atlet bertanding dalam lingkungan yang aman,” kata Erick di Jakarta, Selasa.

Syabilla berusia 22 tahun asal Kabupaten Jepara dan mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Ia meninggal setelah insiden pada nomor open water finswimming 3.000 meter. Perlombaan digelar di perairan Awann Costa, Semarang, Minggu (25/10).

Pada Porprov XVII Jawa Tengah 2026, Syabilla menyumbangkan dua medali emas untuk Jepara. Kedua emas diraih dari nomor 100 meter dan 200 meter bifins putri. Prestasi itu menunjukkan dedikasi atlet mengharumkan nama daerah.

Menpora mengapresiasi pembentukan tim investigasi PB POSSI. Tim itu diharapkan mengungkap kronologi dan mengevaluasi pro-



sedur keselamatan. Kepolisian juga memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami peristiwa.

“Informasi dari panitia dan tim medis, korban diduga mengalami kelelahan,” kata Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Erlin Tan Jaya.

Erick menekankan semua pihak menghormati proses penyelidikan.

Evaluasi mencakup kesiapan tenaga medis, tim penyelamat, dan kecepatan respons. Petugas perlu berwenang bertindak segera saat keselamatan peserta terancam.

Erick juga menegaskan sistem perlindungan tidak boleh hanya mengandalkan kemampuan atlet. Federasi dan penyelenggara harus

memastikan prosedur keselamatan diterapkan nyata. Hasil investigasi harus ditindaklanjuti dengan perbaikan konkret.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen segera mengevaluasi perlombaan di laut terbuka. Evaluasi bertujuan menghindari potensi kecelakaan serupa. Taj

Yasin juga menjabat Ketua Panitia Besar Porprov XVII Jawa Tengah 2026.

“Hal ini menjadi evaluasi kami untuk memastikan keselamatan atlet benar-benar dijaga. Karena perlombaan ini dilakukan di laut. Aspek keamanan atlet harus betul-betul diperhatikan,” ujar Taj Yasin.

Taj Yasin bersama jajaran takziah ke rumah duka Syabilla di Kelurahan Pengkol, Kecamatan Jepara, Senin (26/10). Ia menyampaikan belasungkawa dan bertemu ayah Syabilla, Ajar Tri Raharjo. Ajar masih berduka atas kepergian putrinya.

Penyelenggara telah memastikan atlet terdaftar dalam perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Meski demikian, evaluasi tetap diperlukan untuk perlombaan di laut terbuka. Panitia dan Pemprov Jateng akan memberikan tali asih atas prestasi Syabilla.

Peristiwa bermula saat korban menjalani perlombaan di kawasan laut utara Kota Semarang. Saksi motoris sempat melihat korban melambatkan tangan usai dua putaran. Korban tetap melanjutkan lomba sebelum tenggelam pada putaran ketiga.

Petugas menolong dan mengevakuasi korban ke tepi. Nyawa korban tidak tertolong meski sempat dilarikan ke rumah sakit. Cabang selam digelar di kolam GOR Jatidiri dan Pantai Awann Costa.

Keberhasilan kompetisi tidak hanya diukur dari medali. Jaminan keselamatan seluruh atlet menjadi ukuran penting. Porprov Jawa Tengah digelar 25 hingga 31 Oktober dan mempertandingkan 59 cabang olahraga.

Evaluasi menyeluruh harus memastikan kejadian serupa tidak terulang. Penyelenggara perlu memperkuat prosedur keselamatan di setiap cabang. Perlindungan atlet menjadi tanggung jawab bersama. (ANT/AZM)

Harry Kane Juara Ballon d'Or 2026

LONDON, BANPOS - Harry Kane unggul Kylian Mbappe serta Lamine Yamal pada Ballon d'Or 2026 kategori putra. Penyerang Bayern Muenchen dan timnas Inggris itu mencetak 73 gol dalam 65 pertandingan musim 2025/26. Penghargaan diberikan dalam malam penganugerahan di London, Senin (26/10).

Kane menjadi pemain Inggris pertama dalam 25 tahun terakhir yang memenangi penghargaan itu sejak Michael Owen. Ia mengungguli Mbappe dan Yamal dalam kategori putra. Malam itu menghadirkan 13 penghargaan bagi pemain, pelatih, dan klub.

Alexia Putellas meraih Ballon d'Or putri untuk ketiga kalinya. Pemain Spanyol itu berperan dalam empat gelar Barcelona sebelum pindah ke London City Lioness. Yamal membawa pulang Kopa Trophy sebagai Pemain Muda Terbaik Putra tiga kali beruntun.

Yamal menilai rekan setimnya, Pau Cubarsi, lebih layak menerima penghargaan itu. Luis de la Fuente dinobatkan sebagai Pelatih Terbaik Putra. Ia mengantar Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Paris Saint-Germain terpilih sebagai Klub Terbaik Putra. Barcelona meraih Klub Terbaik Putri. Bukayo Saka dari Arsenal menerima Socrates Award atas kegiatan kemanusiaan dan inisiatif sosial.

Unai Simon dari Athletic Club menjadi Kiper Terbaik Putra. Cata Coll dari Barcelona menjadi Kiper Terbaik Putri.

Vicky Lopez dari Barcelona meraih Pemain Muda Terbaik Putri. Pere Romeu dari Barcelona menjadi Pelatih Terbaik Putri.

Alexia Putellas meraih Ballon d'Or putri untuk ketiga kalinya. Pemain Spanyol itu berperan dalam empat gelar Barcelona sebelum pindah ke London City Lioness. Yamal membawa pulang Kopa Trophy sebagai Pemain Muda Terbaik Putra tiga kali beruntun.

Yamal menilai rekan setimnya, Pau Cubarsi, lebih layak menerima penghargaan itu. Luis de la Fuente dinobatkan sebagai Pelatih Terbaik Putra. Ia mengantar Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Paris Saint-Germain terpilih sebagai Klub Terbaik Putra. Barcelona meraih Klub Terbaik Putri. Bukayo Saka dari Arsenal

menerima Socrates Award atas kegiatan kemanusiaan dan inisiatif sosial.

Unai Simon dari Athletic Club menjadi Kiper Terbaik Putra. Cata Coll dari Barcelona menjadi Kiper Terbaik Putri.

Vicky Lopez dari Barcelona meraih Pemain Muda Terbaik Putri. Pere Romeu dari Barcelona menjadi Pelatih Terbaik Putri.

Harry Kane juga menerima Penyerang Terbaik Putra. Charlyn Corral dari CF Pachuca menjadi Penyerang Terbaik Putri. Doménasi Barcelona terlihat melalui kemenangan Putellas, Yamal, Lopez, Cata Coll, dan Pere Romeu.

Ballon d'Or 2026 berlangsung di London dan memberikan 13 penghargaan. Penghargaan mencakup kategori putra, putri, pelatih, kiper, klub, dan pemain muda. Malam itu menjadi ajang pengakuan atas performa sepanjang musim 2025/26.

Kane mencetak 73 gol dalam 65 laga bersama Bayern Muenchen dan timnas Inggris. Catatan itu menjadi dasar penilaian Dewan Juri Ballon d'Or. Ia mengungguli Mbappe dan Yamal pada kategori putra.

Putellas menambah koleksi Ballon d'Or putri menjadi tiga. Yamal tetap menerima Kopa Trophy meski menilai Cubarsi lebih layak. De la Fuente membawa Spanyol juara Piala Dunia 2026.

Saka dari Arsenal menerima Socrates Award 2026, atas inisiatif sosial. PSG menjadi Klub Terbaik Putra dan Barcelona juga Klub Terbaik Putri di 2026.

(ANT/AZM)



Dewa United Jaga Peluang ke Semifinal

BOGOR, BANPOS - Dewa United Banten melumat Satya Wacana Salatiga 63-44 pada penyisihan Grup B IBL All Indonesian 2026 di GOR Laga Tangkas, Bogor, Selasa. Kemenangan itu memperkuat posisi Dewa United menuju semifinal.

Dewa United langsung mengambil inisiatif sejak kuartier pertama. Tim asuhan Yurifan Hosen menutup 10 menit awal dengan keunggulan 17-12. Pada kuartier kedua, Erick Ibrahim Junior dkk menambah 18 poin dan unggul 35-23.

Catatan editor: naskah asli tidak memuat kutipan narasumber; tidak ada kalimat langsung yang ditambahkan.

Selepas jeda, Dewa United menjaga konsistensi dan menambah 12 poin pada kuartier ketiga. Satya Wacana hanya mencetak 10 angka sehingga skor menjadi 47-33. Pada kuartier keempat, Dewa United menambah 16 poin dan menutup laga 63-44.

Radithyo Wibowo menjadi pencetak angka terbanyak Dewa United dengan 14 poin. Satya Wacana mengandalkan sembilan poin Kevin Immanuel Sihombing. Hasil itu memperpanjang catatan positif Dewa United di Grup B.

Sebelumnya, Dewa United mengalahkan Pelita Jaya Basketball Jakarta 61-59 pada laga pembuka, Sabtu (24/10). Mereka juga menundukkan Hangtuah JG Liem 66-57, Minggu (25/10). Dewa United dijadwalkan menghadapi Kesatria Bengawan Solo pada Kamis (29/10).

IBL All Indonesian 2026 diikuti 10 klub yang terbagi dua grup. Grup A dihuni Bogor Hornbills, Pacific



Caesar, Satria Muda Pertamina Bandung, RANS Simba Bogor, dan Rajawali Medan. Grup B berisi Dewa United, Pelita Jaya, Hangtuah, Satya Wacana, dan Kesatria Bengawan Solo.

Pada laga Grup A, Bogor Hornbills mengalahkan Pacific Caesar Surabaya 73-50. Hornbills unggul pada setiap kuartier dengan skor 20-14, 36-28, 48-37, dan 73-50. Patrick Nikolas menjadi pencetak poin terbanyak dengan 15 poin dan empat rebound.

Widyanta Putra Teja dan David Liberty Nuban masing-masing menambah 12 poin. Gregorio Clau-

die Wibowo dan Muhammad Hardian Wicaksono mencetak 11 poin bagi Pacific. Kemenangan itu memperbaiki catatan Hornbills di Grup A.

Hornbills sebelumnya kalah 64-74 dari Satria Muda, lalu bangkit menundukkan Rajawali Medan 73-47. Pacific belum meraih kemenangan setelah takluk dari RANS Simba Bogor 65-73 dan Satria Muda 70-83. Hornbills selanjutnya menghadapi RANS Simba Bogor pada Rabu (28/10).

Pacific memburu kemenangan pertama saat bertemu Rajawali Medan pada Kamis (29/10). Dua tim teratas masing-masing grup melaju

ke semifinal pada 31 Oktober. Final dijadwalkan 1 November di GOR Laga Tangkas, Bogor.

Turnamen berlangsung 24 Oktober hingga 1 November. Ajang itu menjadi panggung pemain lokal memperoleh menit bermain. IBL All Indonesian 2026 menjadi persiapan menjelang kompetisi reguler IBL 2027.

Dewa United menjaga tempo dan pertahanan rapat sepanjang laga dengan cukup rapi. Konsistensi itu menjadi modal berharga menuju laga penentu melawan Kesatria Bengawan Solo pada Kamis nanti ini. (ANT/AZM)

Tampil Dominan, Janice Tjen Melaju ke 16 besar Guangzhou Open

GUANGZHOU, BANPOS - Ptenis putri Indonesia Janice Tjen tampil kuat saat menyingkirkan petenis Rusia Polina Kudermetova dua set langsung 6-2, 6-2 untuk melaju ke babak 16 besar Guangzhou Open 2026 di China, Selasa.

Janice yang menempati unggulan kedua menyelesaikan pertandingan

babak 32 besar turnamen WTA 250 tersebut di Center Court dalam waktu 58 menit, demikian catatan WTA.

Ptenis peringkat ke-47 dunia itu menunjukkan permainan efektif dengan meminimalkan kesalahan sendiri dan menjaga konsistensi sepanjang pertandingan.

Berdasarkan statistik pertandingan, Janice memenangi 56 persen poin, lebih baik dibandingkan dengan Kudermetova yang hanya meraih 44 persen. Ptenis Indonesia itu juga mencatatkan empat ace tanpa melakukan kesalahan servis ganda.

Keunggulan Janice terlihat dari kemampuannya memanfaatkan kesalahan lawan. Meski Kudermetova menghasilkan 18 winner,

petenis Rusia tersebut melakukan 29 kesalahan sendiri, jauh lebih banyak dibandingkan dengan Janice yang hanya membukukan empat kesalahan.

Pada set pertama, Janice sempat tertinggal 0-1 sebelum bangkit dan mengambil alih kendali pertandingan. Ia merebut sejumlah gim secara beruntun untuk unggul 5-1. Kudermetova hanya mampu menambah satu gim sebelum Janice mengamankan set pembuka dengan skor 6-2.

Dominasi Janice berlanjut pada set kedua. Ia langsung unggul 4-0 setelah mematahkan servis lawan dua kali. Kudermetova sempat mem-

berikan perlawanan dengan merebut dua gim, tetapi Janice tetap mampu mempertahankan keunggulan untuk kembali menang 6-2.

Kemenangan tersebut mengantarkan Janice ke babak 16 besar dan menjaga peluangnya melangkah lebih jauh setelah juga berhasil melaju ke perempat final di sektor ganda bersama petenis veteran Venus Williams. Pada pertandingan berikutnya yang dijadwalkan Rabu (28/10), Janice akan menghadapi petenis Inggris Harriet Dart, yang mengalahkan Tatiana Prozorova dalam tiga set. Di sektor ganda, Janice/Williams selanjutnya akan berhadapan dengan Lyudmyla Kichenok/Makoto Ninomiya. (ANT/AZM)



BANPOS CHANNEL



WWW.BANPOS.CO



BANTENPOS@GMAIL.COM



BANTEN_POS



BANTEN POS

DPRD Soroti Evaluasi Perubahan APBD 2026

CILEGON, BANPOS – Evaluasi Gubernur Banten terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Kota Cilegon 2026 menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari penetapan target pendapatan daerah hingga pemenuhan belanja infrastruktur pelayanan publik. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cilegon, H. Rahmatullah, meminta Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) membenahi proses perencanaan dan verifikasi anggaran agar persoalan serupa tidak berulang.

Rahmatullah menilai, catatan evaluasi tersebut harus menjadi bahan koreksi serius bagi pemerintah

daerah. Menurutnya, ketidaksesuaian data belanja prioritas dan persoalan dalam penetapan target pendapatan menunjukkan perlunya pembenahan tata kelola penyusunan anggaran. “BPKPAD harus menjelaskan bagaimana proses penyusunan dan verifikasi anggaran dilakukan. Jangan sampai dokumen APBD sudah dibahas bersama, tetapi masih menyisakan persoalan mendasar ketika dievaluasi gubernur,” tegasnya.

Salah satu persoalan yang disorot ialah penetapan target pendapatan daerah, khususnya opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dalam evaluasi Gubernur Banten, target penerimaan dari ke-

dua komponen tersebut tercatat sebesar Rp109,85 miliar, atau sekitar Rp4,66 miliar lebih tinggi dibandingkan estimasi pemerintah provinsi.

Selain itu, target retribusi pelayanan kesehatan juga diminta untuk dihitung kembali. Rahmatullah mempertanyakan dasar perhitungan target tersebut, termasuk validitas data yang digunakan sebagai landasan penyusunan pendapatan daerah. “Pertanyaannya sederhana: apa dasar penetapan target tersebut, dan sejauh mana data pendukungnya diverifikasi? BPKPAD harus memastikan setiap angka dalam APBD memiliki dasar perhitungan yang terukur, bukan sekadar dicantumkan sebagai tar-

get pendapatan,” ujarnya.

Persoalan lainnya berkaitan dengan belanja infrastruktur pelayanan publik yang dalam evaluasi gubernur dinyatakan belum memenuhi ketentuan minimum 40 per-sen. Di sisi lain, ditemukan perbedaan signifikan dalam penandaan belanja prioritas antara Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dan dokumen pendukung.

Menurut Rahmatullah, perbedaan tersebut perlu ditelusuri untuk memastikan konsistensi data dan kesesuaian penganggaran dengan ketentuan yang berlaku. Ia meminta BPKPAD memperkuat koordinasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), terutama dalam

proses verifikasi sebelum dokumen anggaran ditetapkan. “BPKPAD perlu memastikan seluruh perangkat daerah menyusun anggaran secara konsisten, datanya sinkron, dan prioritas belanjanya jelas. Jangan sampai persoalan koordinasi dan validasi data justru mengurangi kualitas keputusan anggaran,” katanya.

Ia menegaskan, tindak lanjut evaluasi gubernur tidak boleh berhenti pada penyempurnaan dokumen untuk memenuhi tenggat waktu. Pemerintah daerah perlu menguji kembali kewajaran target pendapatan, memastikan pemenuhan ketentuan belanja, serta memperkuat pengawasan terhadap efektivitas penggunaan ang-

garan. “Ukuran keberhasilan penyusunan APBD bukan sekadar dokumennya selesai, tetapi apakah anggarannya realistis, patuh pada ketentuan, dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. APBD untuk rakyat, bukan sekadar angka di atas kertas,” tandasnya.

Rahmatullah berharap seluruh catatan evaluasi Gubernur Banten ditindaklanjuti secara menyeluruh agar kelemahan dalam perencanaan dan validasi anggaran tidak kembali terjadi pada penyusunan APBD berikutnya. Pembenahan tersebut dinilai penting untuk memastikan anggaran daerah disusun sesuai ketentuan dan diarahkan pada kebutuhan masyarakat. (CR-03/PAY)

Cegah HP Ilegal, Lapas Cilegon Usulkan 40 Wartel

CILEGON, BANPOS – Penggunaan telepon seluler (HP) ilegal di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cilegon menjadi perhatian pihak lapas. Untuk menekan potensi penyalahgunaan HP sekaligus menyediakan akses komunikasi resmi bagi warga binaan, pihak lapas mengusulkan penambahan 40 unit telepon warung telekomunikasi (wartel) dari 60 unit yang saat ini tersedia.

Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Kelas IIA Cilegon, Eko Agus Santoso, mengatakan usulan tersebut diajukan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi sekitar 1.800 warga binaan pemasyarakatan (WBP). “Untuk Lapas Kelas IIA Cilegon, kita tambahkan permintaan 40 unit karena warga binaan kita berjumlah 1.800 orang,” kata Eko, Selasa (27/10).

Menurut dia, wartel menjadi fasilitas bagi warga binaan untuk tetap berkomunikasi dengan keluarga selama menjalani masa pidana. Layanan tersebut juga menyediakan panggilan video sehingga warga binaan dapat melihat kondisi keluarga secara langsung. “WBP bisa video call dengan keluarga, karena rindu dengan keluarganya dan bisa melihat wajahnya langsung,” ujarnya.

Untuk menggunakan layanan itu, warga binaan dapat membeli voucher seharga Rp5.000 dengan durasi komunikasi selama 12 menit. Penggunaan wartel menjadi salah satu jalur komunikasi resmi yang dapat diawasi petugas lapas. Eko berharap ketersediaan fasilitas komunikasi yang memadai dapat mengurangi penggunaan telepon seluler tanpa izin. Sebab, keberadaan HP ilegal di dalam lapas berpotensi disalahgunakan untuk berbagai aktivitas yang melanggar

hukum, termasuk penipuan dan transaksi barang terlarang. “Saya harap tidak ada lagi yang menggunakan handphone di dalam lapas karena kita sudah menyediakan dengan kapasitas yang baik,” tegasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat yang memiliki keluarga di dalam lapas agar memanfaatkan fasilitas wartel untuk berkomunikasi. Dengan begitu, hubungan warga binaan dengan keluarga tetap terjaga tanpa harus menggunakan telepon seluler pribadi. Manfaat layanan tersebut dirasakan warga binaan. Salah seorang warga binaan yang enggan disebutkan namanya mengatakan, keberadaan wartel memudahkannya menghubungi keluarga selama menjalani masa pidana. “Menurut saya, adanya wartel ini sangat bermanfaat. Kami bisa menghubungi keluarga tanpa harus menggunakan handphone sendiri,” katanya.

Ia menambahkan, fasilitas panggilan video memberinya kesempatan untuk mengetahui kabar sekaligus melihat wajah keluarga meski tidak dapat bertemu secara langsung. “Dengan adanya wartel ini, kami bisa tetap berkomunikasi dan mengetahui kabar keluarga di rumah. Apalagi kalau bisa video call, kami juga bisa melihat wajah keluarga secara langsung,” ujarnya.

Lapas Cilegon berharap penambahan 40 unit wartel dapat meningkatkan kapasitas layanan komunikasi sekaligus memudahkan pengawasan terhadap penggunaannya. Namun, efektivitas langkah tersebut dalam menekan peredaran HP ilegal tetap bergantung pada kecukupan fasilitas dan pengawasan di lingkungan lapas. (CR-03/PAY)



Pemkot Cilegon program pemagangan dan pelatihan keterampilan, Selasa (27/10).

Cegah Penipuan Loker, Disnaker Siapkan Pelatihan

CILEGON, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap penipuan berkedok lowongan kerja (loker). Selain meminta pencari kerja memverifikasi informasi melalui perusahaan dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), pemerintah daerah juga menyiapkan program pemagangan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kesiapan tenaga kerja lokal.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon, Aziz Setia Ade Putra, mengatakan masyarakat perlu memastikan kebenaran informasi lowongan sebelum mengajukan lamaran. Langkah tersebut penting untuk menghindari kerugian akibat informasi pekerjaan palsu. “Kalau memang ada info loker itu

harus dicek dulu betul atau tidak dari pihak perusahaannya, agar nantinya tidak menjadi korban penipuan loker palsu,” kata Aziz, Selasa (27/10).

Ia menyarankan pencari kerja memanfaatkan layanan Disnaker Kota Cilegon untuk mengklarifikasi informasi lowongan yang diterima. Masyarakat juga dapat berkonsultasi mengenai peluang kerja melalui kanal resmi instansi tersebut. “Penyalur tenaga kerja itu kan bisa melalui Disnaker, jadi kalau dapat loker bisa dikomunikasikan dan dikonsultasikan dulu ke Disnaker,” ujarnya.

Di sisi lain, Disnaker Cilegon berupaya memperluas akses kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kompetensi pencari kerja, terutama kalangan muda. Program yang disiapkan meliputi pemagangan di

dalam kota maupun tingkat nasional, informasi peluang kerja ke luar negeri, serta publikasi lowongan melalui media sosial.

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Disnaker Kota Cilegon, Hidayatullah, mengatakan program tersebut menjadi bagian dari upaya membantu masyarakat memperoleh akses pekerjaan dan mempersiapkan diri menghadapi kebutuhan dunia industri. “Upaya kami untuk membantu warga Cilegon, terutama anak muda, itu melalui program magang di dalam kota atau nasional, peluang bekerja ke luar negeri, dan di media sosial kami juga beberapa ada informasi loker,” katanya.

Selain membuka akses informasi pekerjaan, Disnaker juga mengembangkan pelatihan berbasis link

and match untuk menyesuaikan kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan industri. Salah satu program yang direncanakan pada 2027 ialah pelatihan psikotes dan pembekalan wawancara kerja.

Hidayatullah menjelaskan, pelatihan tersebut disiapkan untuk membantu pencari kerja menghadapi tahapan seleksi yang selama ini menjadi kendala bagi sebagian pelamar. Rencana itu telah dikomunikasikan dengan Walikota Cilegon, Robinsar, dan mendapat persetujuan untuk ditindaklanjuti. “2027 akan ada pelatihan psikotes untuk bekal interview bekerja, karena informasinya gagal seleksi saat melakukan psikotes. Dari Pak Wali sudah acc (setuju) untuk mengadakan pelatihan psikotes itu,” ujarnya. (CR-03/PAY)

Dana Bergulir Cilegon Salurkan Rp1,2 Miliar ke UMKM



Kegiatan penyaluran peminjaman dana bergulir, beberapa hari lalu

CILEGON, BANPOS – Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dana Bergulir Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DinkopUKM) Kota Cilegon telah menyalurkan pinjaman modal tanpa bunga sebesar Rp1,201 miliar kepada 705 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) selama Januari-Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, 468 merupakan penerima baru, sedangkan 237 lainnya memperoleh tambahan pinjaman modal.

Kepala UPTD Dana Bergulir DinkopUKM Kota Cilegon, Siti Maheli, mengatakan pada Oktober 2026 pihaknya menyalurkan pinjaman sebesar Rp127,5 juta kepada 69 pelaku UMKM. Penyaluran dilakukan melalui Kantor Wilayah I di Kecamatan Cibeber serta Kantor Wilayah II yang melayani Kecamatan Ciwandan dan Citangkil. “Dari total 69 pelaku UMKM yang menerima pinjaman modal tanpa bunga ini, 35 merupakan UMKM baru dan 34 suplesi atau top up,” kata Siti, beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan, penyaluran dana

bergulir tersebut ditujukan untuk memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha mikro di Kota Cilegon. Melalui program ini, pemerintah daerah berupaya membantu pelaku usaha mengembangkan bisnis sekaligus mendorong tumbuhnya wirausaha baru.

Menurut Siti, dukungan permodalan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas usaha dan memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat kecamatan hingga kelurahan. “Dari 705 UMKM yang menerima pinjaman modal, 468 merupakan UMKM baru dan 237 suplesi,” ujarnya.

Siti menambahkan, keberlanjutan program dana bergulir diharapkan semakin membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui penguatan sektor usaha mikro. “Melalui Dana Bergulir, mitra binaan didorong

“ Dari total 69 pelaku UMKM yang menerima pinjaman modal tanpa bunga ini, 35 merupakan UMKM baru dan 34 suplesi atau top up. ”

Siti Maheli

Kepala UPTD Dana Bergulir DinkopUKM Kota Cilegon

mampu mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, dan berkontribusi pada pergerakan ekonomi Kota Cilegon,” tuturnya. Dengan penyaluran yang dilakukan secara bertahap, UPTD Dana Bergulir DinkopUKM Cilegon berharap semakin banyak pelaku usaha yang memperoleh akses pembiayaan untuk memperkuat dan mengembangkan usahanya. (CR-03/PAY)

Cegah Perundungan, Dindikbud Siapkan Empat Psikolog

SERANG, BANPOS – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang menyiapkan empat psikolog untuk mengantisipasi dan menangani persoalan perundungan di lingkungan sekolah. Langkah tersebut dilakukan menyusul banyaknya laporan orang tua yang keberatan karena anaknya mengalami perundungan di satuan pendidikan.

Kepala Dindikbud Kota Serang, Zeka Bachdi, mengatakan perundungan sudah menjadi persoalan serius yang membutuhkan penanganan bersama. Menurutnya, sekolah tidak cukup hanya memberikan imbauan agar siswa berhenti melakukan perundungan, tapi juga perlu mencari tahu penyebab perilaku tersebut.

“Perundungan ini sudah menjadi masalah serius. Banyak laporan dari orang tua yang merasa keberatan karena anaknya dirundung di sekolah. Karena itu, kami melarang keras terjadinya perundungan di seluruh satuan pendidikan, mulai dari PAUD, SD, sampai SMP,” ujar Zeka, Selasa (27/10).

Ia menegaskan, guru memiliki peran penting dalam mencegah perundungan. Setiap guru diminta mengenali karakter siswa yang menjadi tanggung jawabnya, termasuk memahami perbedaan perilaku dan kebiasaan masing-masing anak.

Zeka menilai, selama ini perhatian guru tidak boleh hanya berfokus pada bagaimana siswa mengenal dan menghormati

guru. Sebaliknya, guru juga harus memahami kondisi dan karakter anak didiknya.

“Guru tidak bisa hanya minta dikenal oleh siswa, tetapi tidak pernah mengenal siswanya. Sekarang, satu guru wajib mengenali karakteristik 30 sampai 35 siswa yang ada di tempatnya mengajar,” tegasnya.

Menurut Zeka, setiap anak memiliki karakter berbeda. Ada siswa yang cenderung aktif dan dominan, tetapi ada pula yang pendiam dan lebih tertutup. Perbedaan tersebut perlu dipahami agar guru dapat mendeteksi persoalan yang berpotensi memicu perundungan sejak dini.

Untuk mendukung langkah tersebut, Dindikbud menyiapkan sekitar empat psikolog yang dapat dilibatkan dalam pendampingan. Dindikbud juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk lembaga perlindungan perempuan dan anak serta Badan Narkotika Nasional (BNN), sesuai kebutuhan penanganan.

Pendampingan tidak hanya menasar siswa, tetapi juga orang tua. Dindikbud ingin mengetahui kondisi anak secara lebih menyeluruh, baik ketika berada di sekolah maupun di rumah.

“Kami tidak hanya mengatakan stop perundungan, tetapi juga menyiapkan upaya penanganannya. Kami dampingi dari sisi psikologisnya, termasuk mengajak orang tua berkomunikasi untuk mengetahui apa yang

BACA CEGAH HAL-8



Membekali Generasi Digital Keterampilan dan Manfaatkan AI

SERANG, BANPOS - Keterampilan dan Manfaatkan AI menjadi bekal pelajar Kota Serang menghadapi ruang digital. Diskominfo Kota Serang melatih 100 pelajar SMP dan MTs agar bijak memakai kecerdasan buatan. Pelatihan dua hari itu membagi peserta menjadi dua kelompok.

Kepala Diskominfo Kota Serang Triningsih mengatakan pelatihan meningkatkan kemampuan digital

pelajar. Ia menekankan teknologi mesti dipakai bijak dan kritis. Peserta perlu memahami dampak baik dan buruk AI.

“Jangan sampai menggunakan AI sembarangan tanpa mengetahui apakah informasi yang dihasilkan itu benar atau tidak,” ujar Triningsih.

Menurut Triningsih, akses teknologi belum tentu diikuti kemampuan menilai informasi. AI dapat

menghasilkan jawaban meyakinkan, tetapi belum tentu benar. Pelajar perlu memeriksa ulang informasi sebelum memakainya.

Triningsih menjelaskan pelajar SMP dan MTs dipilih sebagai generasi yang lebih melek digital. Pemahaman teknologi diberikan sejak dini agar pelajar mengenali batasan. Peserta juga diperkenalkan dasar-dasar AI dan ciri konten buatan mesin.

“Anak-anak pelajar ini adalah calon penerus generasi yang memang lebih melek digital,” katanya.

Pelatihan membahas cara membedakan konten manusia dan AI. Triningsih menilai AI bisa salah sehingga pelajar harus kritis. Kebiasaan memeriksa sumber dan kebenaran informasi tetap diperlukan.

Diskominfo membuka pendafataran melalui aplikasi Serang **BACA MEMBEKALI HAL-8**



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

BerAKHLAK **#bangga**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaborasi



Gerakan Toilet Sekolah Bersih

Dindikbud Kota Serang Targetkan Akhir 2026 Selesai

DINAS Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang menargetkan seluruh toilet sekolah di wilayahnya berada dalam kondisi bersih dan sehat paling lambat 31 Desember 2026. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen meningkatkan kualitas lingkungan pendidikan agar peserta didik dapat belajar dengan nyaman, sehat, dan aman.

Kepala Dindikbud Kota Serang, Zeka Bachdi, menyatakan kesiapannya menindaklanjuti tantangan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan Arif Fakrulloh, yang meminta seluruh toilet sekolah dibenahi hingga akhir tahun. Zeka menegaskan, kebersihan fasilitas pendidikan bukan sekadar memenuhi tuntutan, melainkan tanggung jawab bersama yang harus dijalankan secara berkelanjutan.

“Siap Bapak. Kita punya data toilet yang bersih itu sekitar 70 persen dan sisa 30 persen yang belum bersih. Setiap minggu kita lakukan aksi bersih-bersih lingkungan sekolah,” kata Zeka, beberapa waktu lalu.

Berdasarkan pendataan Dindikbud Kota Serang, sekitar 70 persen toilet sekolah telah berada dalam kondisi bersih. Sementara itu, 30 persen lainnya masih menjadi perhatian



dan akan ditangani secara bertahap agar seluruh fasilitas sanitasi sekolah memenuhi standar kebersihan.

Untuk mempercepat pencapaian target, Dindikbud akan memperkuat pemantauan terhadap kondisi toilet di seluruh sekolah. Dalam dua bulan ke depan, pihaknya juga

berencana menerapkan sistem barcode bagi siswa agar mereka dapat menyampaikan keluhan secara langsung apabila menemukan toilet atau fasilitas sekolah yang bermasalah.

“Tantangan tersebut kami ambil dan kami siap untuk melaksanakannya. Insyaallah, dalam waktu dua bulan ke depan, kami akan



memantau seluruh sekolah serta memberlakukan sistem barcode bagi siswa. Melalui barcode ini, siswa dapat langsung mengeluhkan kondisi sekolah mereka khususnya apabila ada toilet yang bermasalah,” terangnya.

Bangun Kesadaran Kebersihan di Lingkungan Sekolah

Zeka menekankan bahwa upaya menciptakan toilet sekolah yang bersih tidak dapat hanya dibebankan kepada petugas kebersihan. Seluruh warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, hingga siswa, perlu membangun kebiasaan menjaga kebersihan sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari.

“Seperti yang telah disampaikan oleh Prof. Yudan, kebersihan harus tertanam di dalam jiwa sebagai bagian dari kewajiban kita,” sambungnya.

Menurut Zeka, program kebersihan harus menjadi gerakan berkelanjutan dan tidak hanya dilaksanakan ketika ada instruksi atau tantangan dari pihak tertentu. Kesadaran untuk menjaga lingkungan perlu dimulai dari diri sendiri sehingga fasilitas sekolah dapat terus terpelihara dengan baik.

Saat ini, Dindikbud Kota Serang membawahi 37 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 223 Sekolah Dasar (SD), dan 29 Sekolah Menengah Pertama

(SMP). Dengan jumlah satuan pendidikan tersebut, pemantauan dan keterlibatan seluruh pihak menjadi penting untuk memastikan program kebersihan berjalan merata.

“Sisa 30 persen toilet yang belum bersih, Insyaallah bisa kita kejar hingga akhir tahun. Semuanya bisa bersih,” janjinya.

Melalui penguatan pemantauan, aksi bersih-bersih rutin, dan rencana penerapan sistem pengaduan berbasis barcode, Dindikbud Kota Serang berharap seluruh toilet sekolah dapat terjaga kebersihannya. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun lingkungan pendidikan yang lebih sehat dan mendukung kenyamanan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. (ADV)



www.disdikbud2.serangkota.go.id



[dindikbudkotaserang_](https://www.instagram.com/dindikbudkotaserang_)

kira-kira lebih dominan mana, apakah mempersulit masyarakat untuk mengecek, atau misalnya justru dari tingkat kehati-hatiannya. Nah, ini nanti kita coba evaluasi kalau terkait dengan mengaksesi PKB-nya,” katanya, Selasa (27/10).

Menyikapi tudingan sejumlah pihak yang menyebut bahwa langkah pembatasan tersebut membatasi masyarakat untuk mengawasi keberadaan aset kendaraan dinas (Randis) yang sebelumnya juga kerap menunggak pajak. Dede Rohana mengaku akan mempelajari lebih lanjut kebijakan tersebut.

“Ya bisa juga kayak gitu ya (membatasi pengawasan publik terhadap pajak Randis pemerintah, red). Tapi memang coba kita akan eva-

luasi bagaimana dampaknya dengan syarat harus memasukkan nomor itu," tambahnya.

Hal senada juga diungkapkan Sekretaris Komisi III DPRD Banten, Mansyur. Menurutny, kebijakan yang kini dikritik banyak pihak tersebut perlu ditinjau kembali. Terutama, kata dia, efeknya bagi masyarakat secara luas.

"Ya, jadi evaluasi aja. Kalau memang itu jadi kendala, ini harus dievaluasi. Intinya, bagaimana masyarakat itu harus diberikan kemudahan-kemudahan," tegasnya.

Mansur mengatakan, bahwa hal dasar yang perlu dilakukan Bapenda bukan membatasi akses informasi publik tersebut. Ia menekankan agar Bapenda Banten lebih

memfokuskan pada strategi dan peningkatan layanan untuk memberikan kenyamanan pada masyarakat yang akan membayarkan pajaknya.

“Yang penting mereka paham, kemudian juga mudah dan dilayani dengan baik. Sehingga pendapatan Provinsi Banten bisa meningkat,” tandasnya.

Diketahui, website info-pkb.bantenprov.go.id kini tidak lagi dapat diakses dengan mudah. Hal itu dikarenakan pada website tersebut mewajibkan penggunaannya untuk memasukkan 5 digit terakhir nomor rangka kendaraan.

Penggunaan untuk mengisi 5 digit terakhir nomor rangka tersebut diketahui hanya berlaku pada sis-

tem informasi PKB Banten saja. Berdasarkan penelusuran BAN-POS, pada Website bapenda.jabarpkb.go.id/infopkb milik Pemprov Jabar atau samsat-pkb2.jakarta.go.id milik Pemprov DKI Jakarta, kedua website tersebut tidak mengharuskan untuk mengisi nomor rangka kendaraan.

Sebaliknya, untuk website [samsat milik DKI Jakarta](http://samsat.milik DKI Jakarta), meskipun terdapat kolom NIK, akan tetapi tidak diwajibkan untuk diisi. Begitu juga untuk website milik Pemprov Jabar yang terdapat kolom *chapta* sebagai pelindung akses yang memastikan jika penggunaanya bukan robot.

Kepala Bapenda Banten Berly Rizky Natakusumah mengatakan,

pembatasan tersebut bertujuan untuk melindungi informasi kendaraan masyarakat agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan yang merugikan pemiliknnya.

Berly menyebutkan, kebijakan ini diterapkan setelah Bapenda menerima laporan mengenai penyalahgunaan informasi kendaraan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karenanya, Bapenda menilai akses terhadap informasi kendaraan perlu dijaga agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan.

"Iya itu sudah sejak bulan lalu kami melakukan untuk mencegah penggunaan informasi pada info-PKB agar tidak disalahgunakan," kata Berly. (MPD/AZM)

Sambungan dari Halaman 7

sebenarnya terjadi pada anak," jelasnya.

Terkait kejadian yang melibatkan siswa SMPN 1 Kota Serang, Zeka menyebut pihaknya telah melakukan penelusuran. Berdasarkan hasil penanganan yang disampaikan Dindikbud, kejadian tersebut dinilai sebagai perkeltahan antisawia, bukan perundungan.

Ia menjelaskan, pihak sekolah telah diminta membuat berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap pihak-pihak yang terlibat, termasuk meminta keterangan dari guru dan kepala sekolah.

"Kejadian di SMPN 1 itu sebenarnya perkeltahan biasa, satu lawan satu. Memang tindakannya salah, tetapi berdasarkan penangulangan kami, tidak ada perundungan," katanya.

Meski demikian, pihaknya tetap memberikan teguran tertulis

kepada guru sebagai bentuk evaluasi terhadap tanggung jawab pengawasan di lingkungan sekolah.

Zeka menegaskan, sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi seluruh siswa. Karena itu, pengawasan tidak bisa hanya dibebankan kepada guru, pengawasan juga membutuhkan keterlibatan orang tua dan sesama siswa.

Melalui deklarasi antiperundungan, Dindikbud berharap seluruh satuan pendidikan di Kota Serang membangun lingkungan belajar yang mengedepankan persahabatan dan persaudaraan.

"Semua harus memahami bahwa mereka bersaudara dan bersahabat. Bercanda boleh, tetapi jangan sampai berlebihan dan menyakitir orang lain. Deklarasi ini kami harapkan berlaku di seluruh satuan pendidikan di Kota Serang," pungkasnya. (ACG/AZM)



POTENSI PERTUMBUHAN INDUSTRI KOPI NASIONAL.

Seorang barista menyeduh minuman kopi pesanan konsumen di salah satu kafe di Kota Serang, Selasa (27/10). Bank Indonesia (BI) pada Juni 2026 menyebutkan industri kopi nasional memiliki ruang pertumbuhan yang sangat masif dengan potensi pendapatan mencapai 12,5 miliar dolar AS atau setara dengan Rp222,81 triliun, optimisme tersebut didorong oleh pertumbuhan jumlah gerai kopi yang melesat hingga 23,9 persen per tahun, lonjakan konsumsi domestik, serta posisi strategis Indonesia sebagai salah satu produsen kopi utama dunia.

Sambungan dari Halaman 7

Digital. Peserta memperoleh sertifikat sebagai bukti keikutsertaan. Triningsih berencana memperluas pelatihan serupa untuk masyarakat umum.

“Anak-anak diberikan bekal untuk mengenali apakah suatu konten merupakan buatan manusia atau AI,” jelas Triningsih.

Walikota Serang Budi Rustandi mendukung pelatihan AI bagi pelajar. Ia berharap program berjalan terus dan menjangkau lebih banyak sekolah. Pemerataan akses pembelajaran digital dinilai penting bagi pelajar.

Budi menyortir risiko AI untuk menyebarkan hoaks. Pendampingan dan edukasi diperlukan agar pelajar memahami batasan teknologi. Pemerintah perlu mengambil peran dalam memberi

pemahaman.

"Saya menginginkan program ini terus berjalan karena ini untuk anak-anak kita se-Kota Serang, baik SMP swasta maupun negeri," kata Budi.

Budi menilai pelatih membantu menguasai penggunaan AI pelajar. Ia ingin teknologi diarahkan ke kegiatan positif. Penggunaan AI mesti diiringi sikap kritis dan tanggung jawab.

Budi menegaskan pemerintah perlu memberi arahan agar AI tidak disalahgunakan. Ia menilai edukasi mencegah hoaks dan dampak negatif. Program pelatihan dinilai perlu berlanjut.

"Makanya kita menggunakan pelatih untuk menguasai dan mengajarkan anak-anak agar ketika menggunakan AI tidak liar, tetapi ke arah yang positif," ujar Budi.

Pada bagian lain, Pemprov Ban-

ten memakai teknologi digital membenahi tata kelola kepegawaian. Modul Bezetting pada sistem SIMASTEN memetakan kebutuhan pegawai. Pemetaan memakai analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Kinerja, dan Disiplin BKD Provinsi Banten Hendar menjelaskan modul itu memetakan persebaran pegawai. Pemerintah melihat kesesuaian jumlah pegawai dengan kebutuhan jabatan. Hasilnya menjadi bahan penempatan struktural, fungsional, dan pelaksana.

Hendar menilai penempatan pegawai perlu mengacu kebutuhan riil organisasi. Kebijakan kepegawaian tidak sekadar mengisi jabatan. Kebijakan mesti mempertimbangkan kebutuhan dan beban kerja perangkat daerah.

"Dengan adanya inovasi ini,

kami berharap tata kelola bidang kepegawaian jauh lebih baik, lebih transparan, dan lebih dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Sekretaris BKD Banten Riyanto menyebut modul Bezzeting memberi beberapa manfaat. Ia berharap tata kelola pemerintahan lebih efektif dan efisien. Sistem manual dinilai perlu digantikan pemetaan digital.

“Pemetaan yang lebih terukur diharapkan membantu pemerintah mengidentifikasi kebutuhan pegawai sekaligus menjadi landasan dalam menyusun kebijakan penempatan ASN,” tandas Hendar.

Pelatihan AI bagi pelajar dan modul Bezzeting menandai perluasan pemanfaatan teknologi. Keduanya menekankan keterampilan, kritis, dan tata kelola berbasis data. Pemerintah daerah menempatkan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti pertimbangan manusia. (ACG/MPD/AZM)

LEBIH MUDAH

**AKSES INFORMASI BANTEN
DI PLATFORM DIGITAL**

BANTEN POS

DOWNLOAD SEKARANG
APLIKASI BANTEN POS DI GOOGLE PLAY

GET IT ON
Google Play

PORTAL BERITA
E- PAPER
YouTube Channel

banpos channel | www.banpos.co | banpospos@gmail.com | banpos_pos | banpos_pos

PENGUMUMAN KEDUA Lelang EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Office Jakarta yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 158 Lelawang, Pandeglang - Banten akan melaksanakan penjualan di muka umum/lelang eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang terhadap jaminan pinjaman atas nama **Herman** sebagai berikut :

1. Sebidang tanah berikhtung bangunan yang berdiat disesuai SHM No.01556/Sukaratu seluas 328 M² an. H. Enjah yang terletak di Kp. Majia Pasi Kapaci RT 002 RW 006, Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Harga Limit Rp. 95.000.000,- dengan setoran uang jaminan Rp. 19.000.000,-.

Syarat-syarat lelang :

1. Cara penawaran lelang dilaksanakan dengan penawaran secara terbuka (open bidding) tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan aplikasi yang diakses pada alamat domain <https://lelang.go.id>. Tata cara mengikuti dapat dilihat di menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Pengeunaan" pada domain tersebut

2. Calon peserta mendaftari dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dan merekam serta mengunggah screenshot KTR dan memasukkan data NPWP serta nomor rekening atas nama sendiri

3. Waktu Pelaksanaan :
Penawaran lelang diajukan melalui alamat domain di atas sejak pengumuman lelang in terbit sampai dengan :
Hari / Tanggal : Rabu, 11 November 2023
Waktu Pelaksanaan : Sejak tayang pada aplikasi lelang di atas s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 11 November Kulat 14:50 Waktu Server e-Auction (WIB)
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang
Jalan Raya Serang-Cilegon KM 3 Kota Serang
<https://lelang.go.id>

Alamat Domain :
Penetapan Pemegang : Setelah batas akhir penawaran

Peserta lelang diharap menyesuaikan diri dengan penggunaan waku server yang tertera pada alamat domain diatas

4. Jaminan Lelang :
a. Peserta lelang diwajibkan menyertor uang jaminan lelang dengan :
- Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama persis dengan uang jaminan yang disartarkan penjual dalam pengumuman lelang ini dan disetorkan seketat dan sekaligus
Setoran uang jaminan lelang harus sudah efektif diterima KPKNL Serang selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum penutupan penawaran lelang

b. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid

5. Penawaran lelang dinilai paling sedikit sama dengan nilai limit dan dapat dikirim berkali-kali.

6. Pemegang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang 2% secara tunai atau cek/giro paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang

7. Setelah lelang selesai, pembeli tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hibung Kekuasaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Perda dimana objek lelang berada

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Office Labuan No. Telp. : (0253) 801035, 801214, 802800, 801761 - atau KPKNL Serang, No. Telp. (0254) 216361

Labuan, 28 Oktober 2026

Ttd

KPKNL Serang

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk
Branch Office Labuan

 **BANK BRI**

PENGUMUMAN LANGUNG ULANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Menyuruh Pengumuman Langung Ulang Eksekusi Hak Tanggungan pada surat karbu hariban Bontas Pos tanggal 21 September 2026 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Office Labuan yang berdasarkan di dalam Jenderal Sudirman No. 156 Labuan, Pandeglang - Banten akan melaksanakan langung ulang eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 dengan penantara Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Kantor Pelayanan Pajak (KPNL) Serang terhadap jaminan pinjaman atas nama Amelia Rifa sebagai berikut:

No. 1 (Satu) bilangan bulat berikud berturut-turut beridit dari tahun sesuai NIB : **28.06.000002925.0** seluas 297 M² Atas Nama **Amelia Rifa** yang terelak di Jl. Sukabumi Blok Blok 1 RT 002 / RW 003 Kelurahan Bagedung, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten.

Harga Limit sebesar Rp. 350.000.000,- dengan setoran uang jaminan Rp. 70.000.000,-.

Syarat-syarat langung :

- Cara Jaminan : Jaminan dilaksankan dengan penawaran secara terbuka (open bidding) tanpa kehadiran peserta langung melalui internet dengan aplikasi yang diakses pada alamat domain <https://elang.id/>. Tata cara mengikuti dapat dilihat di menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada domain tersebut
- Calon peserta mendaftarkan dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dan merekam serta mengunggah softcopy KTP dan memusikan data NPWP serta nomor rekening atas nama sendiri.
- Waktu Pelaksanaan :
 - Penawaran langung diajukan melalui alamat domain di atas sejak pengumuman langung ini resmi terlamp dengan : Hari / Tanggal : Kamis, 05 November 2026
 - Jam : Sejak tengah hari agilang langung s.d. batas akhir penawaran : 05 November 2026 Pukul 14:15 Waktu Server e-Auction (WKB)
- Batas Akhir Penawaran : Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang (KPNL) Serang Jalan Raya Serang-Cilegon KM 3 Kota Serang
<https://elang.id/> di
: Setelah batas akhir penawaran

Alamat Domain : <https://elang.id/>

Penetapan Pemegang : Setelah batas akhir penawaran

Peserta langung diharuskan menyetorkan di dalam penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut.

Uang Jaminan :

- a. Peserta langung diwajibkan menyertakan uang jaminan langung dengan :
 - Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama persis dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman langung ini dan disetorkan sekali dan sekaligus
 - Setoran uang jaminan langung ini bersifat efektif diterima KPNL Tangerang 1 selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum penetapan penawaran langung
- b. Penawaran langung disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta langung. Nomor VA dapat dilihat pada menu status langung di alamat domain masing-masing peserta langung setelah berhasil melakukan pendaftaran dan dapat diakses identitas dinyatakan valid

5. Penawaran langung dimuali paling sedikit sama dengan nilai limit dan dapat dikirim berkali-kali.

6. Pememen langung harus melunasi harga pembelian dan bayar belang 2% secara tunai atau cek/giro paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan langung

7. Informasi lebih lanjut tentang informasi dan/atau bangunan mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Perdana dimana objek langung berada

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Office Labuan No. Telip : (0253) 801035, 801214, 802800, 801761-- atau KPNL Serang No. Telip (0254) 216361

Labuan, 28 October 2026



KPNL Serang

Td
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk
Branch Office Labuan



BANK BRI

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI KAH TANGGUNGAN

Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996/PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Office Luban yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 156 Luban, Pangdajene – Banten akan melaksanakan penjualan di masa umum/lelang eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang berdasarkan jaminan pinjaman atas nama **Uga Permuna** sebagai berikut :

Sebidang tanah berikhtang bangunan yang beridat dasa sesuai SHM No.03527/Panimbangajale seluas 262 M² m. Dima Nurhidiah yang teridat di Panimbang Tlok Lada Desapanimbang Panimbang, Kabupaten Pangdajene, Banten.

Harga Limit Rp. 105.000.000,- dengan setoran setoran setoran setoran Rp. 21.000.000,-

Sebidang tanah berikhtang bangunan yang beridat dasa sesuai SHM No.012323/Panimbangajale seluas 27 M² m. H. Udin Sautan yang teridat di Panimbang Tlok Lada Desa Panimbangpanimbang Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pangdajene, Banten.

Harga Limit Rp. 150.000.000,- dengan setoran setoran setoran setoran Rp. 30.000.000,-

Syarat-syarat lelang :

1. Cara penawaran lelang dilaksanakan dengan penawaran secara terbuka (open bidding) tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan aplikasi yang diakses pada alamat domain www.kpnl.go.id. Tata cara mengikuti dapat dilihat di www.kpnl.go.id dan proses lelang dapat diakses melalui aplikasi www.kpnl.go.id.

2. Calon peserta mendaftarkan dan mengikhtangikan akan pada alamat domain di atas dan merekam secara meng-unggah softcopy KTP dan memasukkan data NPWP serta nomor rekening atas nama sendiri

Waktu Pelaksanaan :

Penawaran lelang dilakukan melalui alamat domain di atas sejak pengumuman lelang ini teridat sampai dengan :

Hari / Tanggal : Rabu, 11 November 2026

Waktu : Sejak teridat pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran

Batas Akhir Penawaran : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang, Jalan Raya Serang-Cilegon KM 3 Kota Serang

Waktu Lelang : www.kpnl.go.id

Alamat Domain : Setelah batas akhir penawaran

Penetapan Pemegang : Peserta lelang diharuskan menyisukan diri dengan penggunaan waktu server yang teridat pada alamat domain tersebut.

Uang Jaminan Lelang :

a. Peserta lelang diwajibkan menyertakan uang jaminan lelang dengan :
- Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama persis dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini dan disetorkan sekali dan sekaligus

Selanjutnya uang jaminan lelang harus sudah efektif ditransfer ke KPKNL Serang selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum penutupan penawaran lelang

b. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid

c. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit dan dapat dikirimi berkali-kali.

d. Penawaran lelang harus melunasi harga pembelian dan besa lelang 2% secara tunai atau cukup giring paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang

e. Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Keugatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Perda dimana ada keugatan objek obyek lelang berada

f. Untuk lebih lanjut lelang di alamat domain www.kpnl.go.id PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Office Luban No. Telp : (0253) 801035, 801214, 802080, 801761- atau KPKNL Serang. No. Telp (0254) 216381

Luban, 28 Oktober 2026

Tdi
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk
Branch Office Luban



KPKNL Serang



BANK BRI

BPJS Wajib...

Sambungan dari Halaman 1

Ia menilai, minimnya informasi berpotensi membuat pasien menanggung kebingungan ketika berhadapan dengan persoalan pelayanan. Padahal, pasien perlu mengetahui pilihan dan prosedur yang dapat ditempuh ketika hak pelayanan kesehatannya terkendala.

“Ketika obatnya tidak tersedia, itu bisa menggunakan sistem klaim reimburse. Artinya, pasien membeli obat sesuai resep di luar, kemudian meminta penggantian biaya ke BPJS. Takutnya masyarakat tidak tahu,” ujar Fadli kepada BANPOS, Selasa (27/10).

Ia mendorong BPJS Kesehatan dan rumah sakit menyampaikan informasi tersebut secara terbuka, termasuk melalui pengumuman di

Pembayaran Kerugian...

Sambungan dari Halaman 1

Rp1,39 miliar, termasuk klaim atas empat kendaraan yang telah diselesaikan. Pengajuan lainnya, masih melalui proses verifikasi dan administrasi sesuai ketentuan pertanggungn yang berlaku,” katanya, Selasa (27/10)

Windy menjelaskan, pendampingan dan penyelesaian klaim penumpang dari sisi penanganan penumpang, seluruh pengguna jasa yang sebelumnya menjalani perawatan di rumah sakit, telah kembali ke kediaman masing-masing.

Pihaknya tetap melanjutkan pendampingan bagi penumpang terdampak, sesuai kebutuhan sebagai bagian dari pelayanan pascainsiden.

Penyelesaian klaim kendaraan dan barang, juga terus berjalan bersama PT Jasa Raharja Putera selaku pihak asuransi.

ASDP terus mengawal perkembangan penanganan Kapal Ferry Batumandi bersama regulator, otoritas pelabuhan, dan instansi terkait sesuai kewenangan masing-masing. Tujuannya, agar setiap tahapan dapat dilaksanakan secara terukur dan bertanggung jawab.

“Kami memahami, bahwa penanaganan pascainsiden membutuhkan proses yang menyeluruh. Karena itu, ASDP akan terus mengawal setiap perkembangan sesuai kewenangan perusahaan, termasuk pendampingan pengguna jasa dan persiapan penanagan kapal,” terangnya.

“Kami ingin memastikan setiap tahapan dilakukan secara cermat, dengan keselamatan dan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas,” sambungnya.

Sementara itu, oil boom, berupa penghalang terapung yang berfungsi membatasi penyebaran minyak di permukaan air apabila terjadi kebocoran. Sejalan dengan pengamanan lokasi, persiapan salvage atau penanganan dan pengangkatan bangkai kapal, kini berada pada tahap evaluasi teknis, penelaahan metode pengangkatan, serta penilaian risiko.

“Hasil kajian tersebut, akan menjadi pertimbangan dalam menentukan langkah penanganan berikutnya, dengan memperhatikan

Vox Populi...

Sambungan dari Halaman 1

Pajak adalah urat nadi pembangunan, katanya. Semua orang dituntut taat, diimbau tepat waktu, dan diancam sanksi jika terlambat meski hanya sehari. Tapi, pernahkah Anda bertanya: ketika data dan informasi pajak itu perlahan ditutup dari akses publik, siapa sebenarnya yang sedang dilindungi? Alasan klasik yang kerap terdengar di balik kebijakan pembatasan akses informasi adalah perlindungan data pribadi. Tentu, kita sepakat. Hak privasi setiap warga negara adalah hal mendasar yang wajib dijaga oleh undang-undang. Tidak ada yang ingin alamat rumah atau nomor telepon pribadinya tersebar secara liar.

Namun, mari kita tarik garis tegas. Mana yang dinamakan privasi warga, dan mana yang seharusnya menjadi informasi publik demi transparansi?

Ketika plat nomor kendaraan dan status pembayaran pajaknya dapat dicek secara terbuka, masyarakat tidak sedang mengintip isi dompet tetangganya. Masyarakat sedang memastikan satu hal sederhana: Apakah keadilan hukum dan kepatuhan pajak berlaku sama untuk semua orang?

Ketika akses data pajak kendaraan dibatasi atau ditutup rapat, muncul ruang gelap. Dan di ruang gelap itulah, potensi kecurangan tumbuh dengan subur.

Pertama, soal kendaraan mewah bodong atau menunggak pajak. Tanpa pengawasan publik, bagaimana kita tahu apakah kendaraan berharga miliaran rupiah

loket farmasi. Dengan begitu, pasien tidak dibiarkan mencari tahu sendiri ketika obat yang diresepkan tidak tersedia di apotek rumah sakit.

Fadli mengatakan, laporan mengenai obat kosong dan penggantian biaya obat pernah diterima Ombudsman. Karena itu, persoalan tersebut perlu disertai penjelasan mengenai mekanisme pengaduan serta prosedur penggantian biaya yang berlaku.

Selain ketersediaan obat, ia menyoroti anggapan sebagian masyarakat bahwa obat generik yang digunakan dalam pelayanan BPJS memiliki kualitas lebih rendah dibandingkan obat bermerek. Menurutnya, BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan perlu menjelaskan alasan penggunaan obat generik serta obat-obatan yang ma-

kan kondisi kapal, keselamatan pelayanan, dan perlindungan lingkungan,” paparnya.

Terpisah, Jasaraharja Putera menepis isu yang beredar di media sosial mengenai persyaratan klaim asuransi korban kebakaran KMP Batu Mandi yang disebut harus menggunakan foto kendaraan di dalam kapal. Pemilik kendaraan cukup melengkapi dokumen persyaratan klaim, yang pengirimannya dapat dilakukan secara digital tanpa harus datang langsung ke posko pengaduan.

Branch Manager Jasaraharja Putera, Zulfikli Lawido, mengatakan isu yang menyebut pemilik kendaraan harus melampirkan foto kendaraan di dalam kapal tidak benar. Menurutnya, proses pengajuan klaim hanya membutuhkan kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan kendaraan.

“Isu yang beredar di media sosial itu tidak benar. Klaim asuransi di kami hanya membutuhkan kelengkapan dokumen terkait klaim kendaraan,” jelasnya.

Adapun dokumen yang perlu disiapkan meliputi fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM) pengemudi, tiket Ferizy, serta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Khusus kendaraan pengangkut barang seperti truk, pemilik juga diwajibkan menyertakan invoice atau dokumen yang memuat rincian barang beserta harganya.

Zulfikli mengungkapkan, pemenuhan persyaratan dokumen kini dapat dilakukan secara digital. Dalam proses tersebut, Jasaraharja Putera dibantu PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) untuk menghubungi pemilik kendaraan yang data atau dokumen klaimnya belum lengkap.

“Kami akan menghubungi pemilik kendaraan melalui WhatsApp. Jika tidak ada respons, kami akan menelepon,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Kapal Motor Penumpang (KMP) Batumandi tenggelam usai terbakar hebat di perairan Merak, Rabu (21/10) sekira pukul 21.00 WIB. Akibat hal itu, proses investigasi kapal milik PT ASDP Indonesia Ferry tidak bisa dilakukan oleh tim penyidik. (CRO3/MPD/ENK)

yang melintas di jalanan sudah menunaikan kewajibannya, atau justru menikmati kebebasan tanpa sanksi?

Kedua, transaksi jual-beli kendaraan bekas. Pembeli awam menjadi pihak yang paling dirugikan. Tanpa transparansi data pajak dan rekam jejak kendaraan, masyarakat kecil rentan menjadi korban penipuan atau membeli kendaraan bermasalah secara hukum.

Ketiga, akuntabilitas pejabat publik. Kendaraan adalah salah satu indikator kekayaan yang paling kasat mata. Keterbukaan informasi pajak adalah benteng audit sosial dari rakyat terhadap para pemimpinnya.

Jadi, jika transparansi ini dipangkas, apakah kebijakan ini benar-benar melindungi rakyat kecil dari kebocoran data, atau justru menjadi perisai nyaman bagi mereka yang ingin bersembunyi dari kewajiban?

Sebuah ungkapan yang sering kita dengar dari masyarakat: “Kami disuruh taat bayar pajak, kalau lewat sehari kena denda. Tapi kalau mau tahu pajak kendaraan lain transparan atau tidak, kenapa malah disulitkan?”

Keterbukaan informasi publik bukanlah bentuk ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah. Keterbukaan adalah syarat utama dari sebuah kepercayaan.

Ketika pemerintah meminta rakyatnya untuk jujur dan taat, maka hal minimal yang bisa diberikan oleh negara adalah transparansi. Menutup pintu informasi dengan dalih perlindungan hanya akan memicu kecurigaan.*

suk dalam cakupan penjaminan.

“Kalau masalah kualitas obat, BPJS juga harus memberi penjelasan kepada masyarakat. Masyarakat perlu tahu kenapa menggunakan obat generik atau kenapa beberapa obat tidak di-cover, termasuk bagaimana mekanismenya jika ada obat tertentu yang tidak dijamin,” katanya.

Fadli juga menekankan bahwa ketersediaan obat di rumah sakit tidak bisa serta-merta dikaitkan dengan kondisi keuangan BPJS Kesehatan. Sebab, pengadaan obat dilakukan oleh fasilitas kesehatan, sedangkan BPJS menjalankan mekanisme penjaminan dan pembayaran klaim sesuai ketentuan.

“BPJS tidak menyediakan obat. Rumah sakit yang mengadakan, kemudian mengajukan klaim ke BPJS. Jadi, kalau dianggap obatnya tidak bagus atau jumlahnya tidak mencukupi, perlu dipastikan dulu ke rumah sakit atau BPJS,” ujarnya.

Terkait isu BPJS Kesehatan kehabisan anggaran hingga berdampak pada pelayanan dan keter-

Kos-kosan per Jam...

Sambungan dari Halaman 1

Menanggapi itu, Walikota Serang Budi Rustandi mengancam akan menindak tegas pemilik kos-kosan yang terbukti menyalahgunakan fungsi bangunannya. Termasuk tempat kos yang disewakan per jam dan diduga digunakan untuk aktivitas negatif.

Pemkot Serang, kata dia, juga berencana membentuk satuan tugas (satgas) di setiap kelurahan yang terindikasi memiliki banyak kos-kosan untuk mengawasi dan menertibkan usaha tersebut. Langkah ini menyusul maraknya sorotan terhadap rumah kos yang diduga beralih fungsi menjadi tempat kegiatan yang melanggar norma dan aturan.

Budi mengatakan, dirinya telah berkoordinasi dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang untuk menyiapkan langkah penertiban. Ia juga telah menghubungi Bapperida agar ikut merumuskan langkah terkait pengawasan perizinan.

“Insyaallah saya sudah koordinasi dengan Kasatpol dan saya perintahkan untuk membuat Satgas per kelurahan yang terindikasi banyak kosannya. Kita pantau, termasuk nanti izin-izinnya. Bapperida juga sudah saya telepon untuk segera merumuskan,” kata Budi kepada awak media, Selasa (27/10).

Ia menegaskan, penertiban ti-

Dewan Minta...

Sambungan dari Halaman 1

diam. Ya diusut tuntas. Saya mendukung apa yang disampaikan oleh Bupati, kalau memang ada oknum segera diusut tuntas, jangan dibiarkan,” tegas Musa, Selasa (27/10).

Anggota DPRD Banten daerah pemilihan (Dapil) Banten X atau Kabupaten Lebak ini secara tegas menyampaikan bahwa oknum yang mengganggu investasi di Provinsi Banten harus disikapi secara tegas. Sebab, kata dia, setelah PT PWI, dikhawatirkan adanya perusahaan lain yang ikut هنگang dan membuat angka pengangguran Banten kembali melonjak.

“Saya kira ini tidak bisa dibiarkan. Karena ini kalau dibiarkan, bisa jadi nanti terjadi di perusahaan-perusahaan lain. Artinya kalau ada oknum yang mengganggu terus dibiarkan, ini akan mengganggu investasi, yang nantinya ya mereka pada kabur,” ungkapnya.

“Nah kalau mereka kabur, ini aja sudah 1.000 lebih karyawan yang dirumahkan, artinya di-PHK, menambah beban bagi pemerintah daerah Kabupaten Lebak juga pemerintah Provinsi Banten, meningkatnya angka pengangguran

Menata Hari...

Sambungan dari Halaman 1

pekerjaan rumah tangga sekaligus mengasuh anak yang diasuh sang ibu. Aktivitas itu kini menjadi bagian dari kesehariannya setelah kehilangan pekerjaan pada awal Oktober 2026.

Bagi Elsa, berhentinya operasional PT PWI 6 di Kecamatan Rangkasbitung bukan sekadar kabar tentang pabrik yang tutup. Peristiwa itu juga mengakhiri masa kerjanya selama satu tahun delapan bulan, ketika ia bisa memperoleh penghasilan sendiri dan bekerja lebih dekat dengan kampung halaman.

Sebelum bekerja di PWI 6, Elsa pernah mencari nafkah di Jakarta. Pekerjaan di perusahaan manufaktur alas kaki yang memproduksi sepatu olahraga untuk pasar internasional itu memberinya kesempatan untuk bekerja tanpa harus jauh dari keluarga.

Setiap bulan, Elsa bisa mendapatkan penghasilan sekitar Rp4

sediaan obat, Fadli mengatakan pihaknya belum menerima keluhan dari rumah sakit mengenai tunggakan pembayaran klaim dalam kondisi yang sedang ramai diperbincangkan tersebut.

Meski demikian, ia menilai persoalan itu perlu diperiksa berdasarkan data dan keterangan dari fasilitas kesehatan. Jika terdapat klaim yang belum dibayarkan, penyebabnya juga harus ditelusuri, apakah berkaitan dengan kelengkapan dokumen dan persoalan administrasi atau justru keterlambatan pembayaran oleh BPJS Kesehatan.

“Kalau memang ada kondisi seperti itu, kita harus cek dulu ke rumah sakit-rumah sakit. Apa benar ada tunggakan BPJS? Kalau ada, faktornya apa? Kalau memang BPJS punya utang sehingga rumah sakit akhirnya mengurangi stok obat, itu perlu ditelusuri,” katanya.

Ia menambahkan, rumah sakit yang mengalami kendala pembayaran klaim juga dapat mel-

dak akan berhenti pada pengawasan semata. Pemkot Serang juga akan melakukan sidak untuk memastikan penggunaan kos-kosan sesuai dengan peruntukan dan ketentuan yang berlaku. “Iya dong, pasti (sidak),” tegasnya.

Namun, Budi menyebut pelaksanaan sidak masih akan dibahas bersama Satpol PP. Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan konsep yang jelas agar penindakan tepat sasaran dan memberikan efek jera kepada pemilik usaha yang terbukti menyalahgunakan bangunannya.

“Nanti kita rapat dulu karena konsepnya harus jelas. Ini memang untuk membuat jera para pengusaha kos-kosan yang mengalihkan fungsinya,” ujarnya.

Walaupun demikian, Budi mengaku belum menerima data lengkap mengenai jumlah kos-kosan yang disewakan per jam maupun lokasi yang diduga digunakan untuk kegiatan negatif. Meski begitu, ia memastikan pemerintah akan menindaklanjuti persoalan tersebut, termasuk memeriksa legalitas usaha dan menindak pemilik yang terbukti melanggar aturan.

Terkait kemungkinan pembongkaran bangunan, Budi menyatakan langkah tersebut akan dilakukan apabila terdapat dasar hukum yang memungkinkan.

“Kalau memang ada aturannya dibongkar, ya kita bongkar sesuai

Ini persoalan serius yang tidak bisa dibiarkan oleh pemerintah baik kabupaten maupun provinsi,” sambungnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Fraksi PPP-PSI DPRD Banten ini juga menayangkan kurangnya komunikasi antara pihak perusahaan dengan pemerintah daerah jika memang mengalami sejumlah intimidasi atau hal lainnya. Ia juga mengkritik kinerja dari pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) baik di Pemda Lebak maupun Pemprov Banten yang tidak bergerak cepat saat mendeteksi adanya persoalan yang dihadapi para investor.

“Saya sangat menayangkan yang dilakukan oleh PWI yang melakukan PHK terhadap 1.000 lebih karyawan. Apapun hasilnya, saya juga melihat bahwa kalau ada persoalan-persoalan misalnya intimidasi atau yang mengganggu, saya kira bisa disampaikan kepada pemerintah daerah atau aparat penegak hukum,” paparnya.

“Disnaker Provinsi Banten juga harusnya tidak boleh tinggal diam. Dari awal harusnya Disnaker juga bisa mendeteksi akan terjadinya PHK, harusnya proaktif komunikasi dengan pihak investor atau

juta hingga Rp5 juta, terutama ketika mendapat tambahan upah dari lembur. “Penghasilan alhamdulillah, lebih dari UMR kalau ada lemburan,” ujar Elsa kepada Beritasatu.com.

Pekerjaan di pabrik memang menguras tenaga. Namun, bagi Elsa, masa-masa bekerja di sana tetap menjadi pengalaman yang menyenangkan. Ia mengaku tidak memiliki persoalan berarti selama menjalani pekerjaannya. “Pertama capek ya pasti. Kedua, have fun aja sih sebenarnya,” katanya.

Rutinitas itu kemudian terhenti. Elsa memperkirakan dirinya terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sekitar 5–6 Oktober 2026, setelah operasional pabrik berhenti.

Sejak saat itu, ia kembali menjalani hari-hari di rumah. Belum ada pekerjaan baru yang menunggunya, begitu pula rencana pasti tentang ke mana ia akan melamar.

Ketika ditanya mengenai ke-

porkan persoalan tersebut kepada Ombudsman apabila terdapat dugaan maladministrasi dalam proses pelayanan atau pembayaran.

Di sisi lain, Fadli meminta BPJS Kesehatan memastikan rumah sakit mitra menerapkan standar pelayanan secara konsisten. Ia mengaku masih menemukan perbedaan dalam penilaian kelayakan pasien untuk memperoleh pelayanan melalui instalasi gawat darurat (IGD).

Menurutnya, pasien dengan kondisi yang sama semestinya mendapatkan penilaian berdasarkan standar dan prosedur yang jelas, bukan menghadapi perbedaan keputusan tanpa penjelasan yang memadai. “Harusnya standarnya sama setiap rumah sakit. BPJS yang harus memastikan semua mitranya sesuai dengan prosedur, jangan sampai masyarakat yang berasumsi,” tegasnya.

Fadli juga mengingatkan pentingnya sosialisasi mengenai hak peserta yang sedang berada di luar wilayah fasilitas kesehatan tingkat pertama tempatnya terdaftar. Ia

aturan. Kalau memang tidak ada izinnya, kita pakai aturan yang ada. Kita tidak boleh melanggar aturan,” tandasnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Serang, Dulbarid, juga mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan Satpol PP untuk melaksanakan sidak terhadap sejumlah rumah kos di Kota Serang. Menurutnya, DPMPTSP saat ini tengah melakukan pemetaan terhadap rumah kos yang diduga beralih fungsi menjadi penginapan dengan sistem penyewaan kamar per jam.

“Iya, kita harus lakukan sidak,” ujar Dulbarid kepada BANPOS saat ditemui usai acara Launching Serang Cerdas di Hotel Ratu, Senin (26/10).

Ia menjelaskan, koordinasi dengan Satpol PP telah dilakukan, tetapi masih sebatas pembahasan awal mengenai lokasi dan waktu pelaksanaan sidak. Karena itu, jadwal penertiban belum dapat dipastikan. “Kita masih secara persuasif ngobrol-ngobrol dulu, kapan akan dilaksanakan, kemudian di mana saja, dan kapan waktunya,” katanya.

Ia menegaskan, perubahan fungsi yang dimaksud adalah rumah kos yang semula menerapkan sistem sewa bulanan, tetapi kemudian menawarkan penyewaan kamar dengan hitungan jam. “Beralih

perusahaan PWI, juga dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi terbaik,” timpalnya.

Sementara, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lebak, Lingga Segara, mengklaim berakhirnya aktivitas PWI 6 tidak terlalu berpengaruh terhadap realisasi investasi daerah. Namun, kondisi tersebut berpotensi lebih terasa pada sektor ketenagakerjaan karena perusahaan itu sebelumnya menyerap banyak pekerja.

“Jadi secara realisasi tidak terlalu signifikan. Mungkin yang lebih signifikan itu ke tenaga kerja saja,” ujar Lingga saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (27/10).

Ia menerangkan, realisasi investasi perusahaan umumnya dihitung berdasarkan belanja modal atau *capital expenditure*, seperti pembelian mesin dan penambahan aset. Adapun biaya operasional tidak menjadi komponen utama dalam pelaporan realisasi investasi tersebut.

“Kalau investasi itu dilaporkan oleh perusahaan-perusahaan, dia kapital expenditure, modal, bukan operasional expenditure. Ketika sudah berproduksi dan tidak ada penambahan belanja modal, me-

menilai informasi semacam itu perlu disampaikan secara luas agar peserta memahami prosedur pelayanan yang dapat diakses ketika sakit saat berada di daerah lain.

Ia pun mengajak masyarakat menyampaikan laporan kepada Ombudsman apabila mengalami kendala dalam pelayanan BPJS Kesehatan. Menurutnya, laporan masyarakat diperlukan agar persoalan yang terjadi dapat ditindaklanjuti dan tidak berulang.

“Kalau memang ada kendala terkait BPJS, silakan disampaikan ke Ombudsman agar bisa kami tindak lanjuti,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Keluhan peserta BPJS Kesehatan yang merasa menerima obat tidak lengkap dan menilai pengobatan tidak memberikan hasil sesuai harapan menjadi alarm bagi penyelenggara jaminan kesehatan. Persoalannya bukan semata-mata soal obat, melainkan kepercayaan peserta terhadap layanan yang setiap bulan mereka biayai melalui iuran. (MYU/ENK)

fungsi itu yang tadinya kos-kosan, kemudian disewakan per jam. Itu beralih fungsi,” tutupnya.

Ketua DPRD Kota Serang Muji Rohman, juga mengungkapkan bahwa tindakan yang dilakukan pemilik kos-kosan untuk disewakan per jam jelas menabrak aturan. Secara spesifik, hal itu melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Ketentuan Perizinan Tempat Usaha.

“Hal ini bertentangan dengan Perda, di mana pemondokan atau kos-kosan diidentifikasi sebagai rumah yang terdiri dari kamar-kamar untuk disewakan per bulan atau per tahun, bukan per jam” tegasnya.

Selain masalah izin usaha, Muji juga menyoroti aspek ketertiban dan keamanan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa pengawasan operasional kos-kosan telah diatur dengan jelas dalam regulasi terbaru terkait ketertiban umum.

Aturan yang dimaksud adalah Perda Kota Serang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Aturan ini kemudian diperkuat oleh Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 63 Tahun 2023. “Dalam aturan tersebut jelas, di mana pemilik kos-kosan bertanggung jawab menjaga lingkungan agar tidak melanggar norma atau disalahgunakan,” tegasnya. (ACG/ENK)

sin dan lainnya, maka dalam laporannya itu nol,” jelasnya.

Lingga menilai, berakhirnya aktivitas PWI 6 perlu menjadi perhatian dalam upaya menjaga penyerapan tenaga kerja. Karena itu, ia berharap peluang investasi baru dapat dimanfaatkan untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Lebak.

Ia menyebut, selain penyediaan zona industri, pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan Waduk Karian menjadi faktor pendukung untuk menarik minat pelaku usaha. Infrastruktur tersebut dinilai dapat menunjang mobilitas serta kebutuhan industri, termasuk ketersediaan air.

“Pertama itu tata ruang yang sudah disiapkan. Ada 13 zona industri kurang lebih 10.900 hektare untuk kawasan industri,” ungkapnya.

Lingga optimistis realisasi investasi Kabupaten Lebak pada 2026 dapat mencapai target yang ditetapkan. Ia menilai perkembangan iklim investasi di daerah tersebut masih berjalan baik.

“Secara pertumbuhan iklim di Lebak sejauh ini berjalan dengan baik, masih sesuai target. Tahun ini saya yakin 100 persen lebih tercapai,” katanya. (MPD/TQS/ENK)

Pengalaman kehilangan pekerjaan membuat Elsa berharap pemerintah daerah memberi perhatian lebih terhadap ketersediaan lapangan kerja. Menurut dia, kesempatan kerja yang lebih luas akan membantu masyarakat, terutama mantan pekerja yang terdampak penutupan pabrik, untuk kembali mendapatkan penghasilan. “Lebih baik didorong sih. Perbanyak lapangan kerja juga supaya gampang nyari kerja,” kata Elsa.

Penutupan operasional PWI 6 di Rangkasbitung pada Oktober 2026 berdampak terhadap sekitar 1.000 pekerja. Di antara para pekerja yang terdampak, Elsa kini menjalani keseharian dengan aktivitas yang berbeda dari sebelumnya.

Ia masih membantu ibunya di rumah. Sementara itu, keinginan untuk kembali bekerja tetap ada, meski Elsa belum tahu kapan kesempatan berikutnya akan datang. (ENK)

Pemilik Bengkel Jadi Tersangka Penyalahgunaan Solar Subsidi

SERANG, BANPOS - Pemilik bengkel berinisial BH jadi tersangka penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar di Kota Serang. Polisi mengamankan 650 liter Bio Solar dari bengkel sepeda motor. Praktik itu diduga berlangsung selama tiga tahun.

Kapolresta Serang Kota, Kombes Pol Yudha Satria menyebut pengungkapan dilakukan Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polresta Serang Kota. Polisi menemukan ratusan liter solar di bengkel yang diduga tempat penampungan BBM bersubsidi. Lokasi itu juga diduga menjadi tempat pen-

jualan eceran.

“Barang bukti yang diamankan kurang lebih 650 liter BBM jenis Bio Solar. Di lokasi ditemukan tiga drum besar, jeriken, serta kendaraan roda empat yang digunakan sebagai sarana angkut,” kata Yudha dalam konferensi pers pada Selasa (27/10).

Berdasarkan pemeriksaan awal, BH diduga menyuruh orang lain membeli solar subsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Ia memakai surat rekomendasi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Serang. Surat itu dipakai untuk memperoleh solar bersubsidi dengan wadah jeriken.



Konferensi Pers di Mapolresta Serang Kota pada Selasa (27/10).

Polisi masih mendalami keaslian surat rekomendasi yang digunakan tersangka. Penyidik akan mengonfirmasi klaim BH

yang tercatat sebagai anggota kelompok tani. Polisi juga mendalami kemungkinan keterlibatan pihak SPBU atau operator yang berwenang.

“Kami masih akan melakukan pendalaman, apakah surat rekomendasi tersebut asli atau palsu. Termasuk kemungkinan keterlibatan pihak SPBU atau operator, nanti akan kami dalam,” ujarnya.

Berdasarkan keterangan tersangka, solar dibeli dengan harga Rp6.800 per liter di SPBU. BH menjual kembali secara eceran seharga Rp10.000 per liter. Selisih Rp3.200 per liter diduga menjadi sumber keuntungan tersangka tersebut.

Dalam sehari, BH disebut mampu memperoleh hingga 200 liter solar dari SPBU. Tersangka mengaku menjalankan praktik itu selama kurang lebih tiga tahun. Polisi masih mengembangkan mekanisme penggunaan surat rekomendasi.

“Atas perbuatannya, BH dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi,” tegasnya.

Hingga kini BH menjadi tersangka dalam perkara tersebut. Pasal itu selalu memuat ancaman pidana penjara hingga enam tahun. Denda paling banyak Rp60 miliar juga mengancam tersangka. (MYU/AZM)



Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Serang, A Supi

Warga Keluhkan Jaringan Internet di Kawasan Royal Baroe

SERANG, BANPOS - Fasilitas internet gratis di kawasan Royal Baroe, Kota Serang, dikeluhkan pengunjung karena jaringan yang lambat dan tidak berfungsi maksimal. Padahal, fasilitas tersebut diharapkan dapat menunjang kenyamanan masyarakat saat berkunjung dan menikmati kawasan yang menjadi salah satu ruang publik di Kota Serang.

Salah seorang pengunjung, Jahid, mengatakan, fasilitas WiFi memang tersedia di kawasan tersebut. Namun, koneksi internet yang lambat membuat layanan itu tidak bisa dimanfaatkan secara optimal.

Menurutnya, keberadaan WiFi seharusnya didukung kualitas jaringan yang memadai agar masyarakat benar-benar bisa merasakan manfaatnya.

“WiFi memang ada di sini, cuma jaringannya lemot. Jadi seperti bohong, karena memang tidak berfungsi maksimal. Saya kira bisa digunakan dengan baik, ternyata tidak,” ujar Jahid saat ditemui sore hari di Kawasan Royal Baroe, Selasa (27/10).

Ia menilai, sebagai kawasan yang menjadi kebanggaan Kota Serang, Royal Baroe seharusnya ditunjang sarana dan prasarana yang baik, termasuk akses internet yang lancar.

Jahid mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab lambatnya jaringan tersebut. Namun, ia berharap pemerintah melakukan evaluasi agar fasilitas yang tersedia bisa berfungsi sesuai harapan masyarakat.

“Harusnya dikaji matang-matang lagi supaya lancar. Dievaluasi agar masyarakat yang datang ke sini bisa menikmati fasilitas sambil berlibur. Semoga secepatnya ada tindakan dari pihak terkait,” harapnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Serang, A Supi, mengatakan, pihaknya telah mengusulkan peningkatan jaringan internet melalui penambahan infrastruktur fiber optik pada anggaran 2027.

Menurutnya, sebagian jaringan internet yang digunakan saat ini masih mengandalkan radio pemancar. Teknologi tersebut dinilai memiliki keterbatasan dibandingkan fiber optik yang dapat mendukung koneksi lebih stabil.

“Kominfo sudah berusaha melalui Bu Kadis untuk mengajukan penambahan fiber optik. Kalau sudah menggunakan fiber optik, otomatis kecepatan internet bisa lebih lancar. Selama ini di beberapa titik masih menggunakan radio, sehingga bisa mengalami gangguan atau lag,” jelasnya.

Supi menyebutkan, saat ini jaringan internet telah dipasang di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, dan 67 kelurahan di Kota Serang.

Sementara untuk fasilitas publik, pemasangan tersedia di sejumlah lokasi, termasuk kawasan Royal Baroe. Di kawasan tersebut, Kominfo telah memasang 15 titik akses internet.

Meski demikian, peningkatan kualitas jaringan di ruang publik masih menjadi pekerjaan yang perlu ditindaklanjuti agar fasilitas yang disediakan pemerintah dapat dimanfaatkan masyarakat secara maksimal.

Supi berharap, usulan penambahan jaringan fiber optik untuk tahun anggaran 2027 dapat memperoleh dukungan anggaran dari Pemkot Serang.

“Penambahan atau peningkatan fiber optik sudah berlibur. Semoga secepatnya ada tindakan dari pihak terkait,” harapnya.

(ACG/AZM)

SERANG, BANPOS - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggembleng anggota DPRD Provinsi Banten bersama pasangan melalui workshop integritas dan antikorupsi. Kegiatan berlangsung di Aston Hotel, Kota Serang, Selasa (27/10). KPK menilai keluarga berperan penting mencegah korupsi penyelenggara negara.

Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo mengatakan pelibatan pasangan merupakan bagian pencegahan melalui pendidikan. Keluarga dinilai strategis mengingatkan penyelenggara negara menjaga perilaku. Pasangan menjadi orang terdekat yang memberi masukan harian.

“Oleh karena itu, kami mengajak kepada seluruh penyelenggara negara untuk menerapkan pola hidup sederhana,” katanya.

Ibnu menyebut keluarga dapat menjadi pengingat integritas atau memperkuat perilaku koruptif. Faktor korupsi meliputi gaya hidup berlebihan, tekanan ekonomi, dan penyalahgunaan jabatan. Pendidikan dan pencegahan menjadi langkah utama.

Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim mengatakan workshop memperkuat pemahaman pencegahan korupsi. Arahan KPK diharapkan diterapkan dalam tugas dan fungsi DPRD. Pasangan anggota dewan berperan saling mengingatkan sesuai amanat undang-undang.

“Pelibatan pasangan ini merupakan bagian untuk bersama-

Integritas Dimulai Dari Keluarga

Anggota DPRD Digembleng KPK



sama menjaga dan menguatkan integritas, karena pasangan ini memiliki peran dalam mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan,” katanya.

Gubernur Banten Andra Soni menegaskan penguatan integritas legislatif dan eksekutif harus beriringan. DPRD memiliki fungsi pembentukan perda, penganggaran, dan pengawasan. Integritas legislatif tidak dapat dipisahkan dari pemerintahan bersih eksekutif.

Pemprov Banten memperkuat tata kelola transparan, akuntabel, dan berintegritas. Upaya itu melalui pengendalian internal, digitalisasi, keterbukaan informasi, dan tindak lanjut rekomendasi KPK. Andra mengajak penyelenggara negara menjadikan integritas dasar keputusan.

“Pemerintahan yang bersih hanya dapat terwujud apabila kedua unsur penyelenggara sama-sama memegang teguh komitmen antikorupsi,” katanya.

Ibnu menjelaskan keluarga memiliki dua kemungkinan peran terkait perilaku koruptif. Pasangan dapat menjadi pengingat agar pejabat menjaga integritas. Namun keluarga juga berpotensi memperkuat perilaku koruptif tanpa komitmen antikorupsi.

Ibnu memaparkan faktor rantai penyebab korupsi, seperti gaya hidup berlebihan dan tekanan ekonomi. Rasionalisasi dan penyalahgunaan jabatan turut menjadi pemicu. Keluarga dapat menanggung akibat ketika korupsi terjadi.

“Dengan demikian, upaya pencegahan tidak hanya bertumpu pada aturan dan penga-

wasan kelembagaan, tetapi juga diperkuat melalui kesadaran orang-orang terdekat,” ujarnya.

Fahmi berharap workshop tidak berhenti pada pemahaman. Nilai integritas perlu diterapkan dalam pekerjaan anggota DPRD. DPRD berkomitmen memperkuat integritas bersama penyelenggara negara.

Gubernur Banten Andra Soni menegaskan penguatan integritas legislatif dan eksekutif harus beriringan. Kepala daerah dan DPRD merupakan mitra sejajar pemerintahan. Keduanya kini perlu komitmen bersama mencegah korupsi.

“Maka saya berharap komitmen antikorupsi tidak hanya disampaikan dalam forum resmi, tetapi benar-benar diterapkan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan,” tegasnya. (MPD/AZM)

Pencabul Anak Belum Diamankan, Polisi Kuatkan Bukti

SERANG, BANPOS - Pencabul anak belum diamankan polisi meski kasus oknum ketua RT di Kota Serang naik ke penyidikan. Penyidik masih memperkuat alat bukti sebelum menetapkan tersangka. Korban didampingi Satgas PPA Kota Serang untuk pemeriksaan psikologis dan pemulihan trauma.

Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Serang Kota IPDA Febby Mufti mengatakan saksi dan terlapor telah diperiksa. Terlapor tidak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Penyidik



Kantor Satreskrim Polresta Serang Kota.

sebelumnya menggelar perkara untuk menetapkan tersangka.

“Pelaku saat kami periksa

tidak mengakui perbuatannya,” kata Febby kepada BANPOS, Selasa (27/10).

Hasil gelar perkara meminta penyidik memeriksa dokter ahli forensik guna memperkuat alat bukti. Pemeriksaan dijadwalkan pagi berikutnya sebelum penetapan tersangka. Penyidik berencana melakukan upaya paksa setelah pemeriksaan ahli.

Febby menegaskan penetapan tersangka harus didasarkan pada kecukupan alat bukti. Langkah itu diperlukan agar proses hukum sesuai ketentuan dan menjunjung asas praduga tak bersalah. Ia menyebut penguatan bukti menghindari presumption of innocence.

“Untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, harus kami kuatkan alat bukti kami, supaya menghindari presumption of innocence,” jelasnya.

Korban saat ini didampingi Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Serang. Pendampingan mencakup pemeriksaan psikologis sekaligus pemulihan

trauma. Kepolisian berkomitmen menangani perkara secara profesional karena menyangkut anak di bawah umur.

Penyidik berupaya memberikan kepastian hukum kepada korban dengan pendekatan humanis. Penanganan tetap mengedepankan keadilan dan transparansi. Privasi korban menjadi perhatian dalam setiap tahap pemeriksaan.

“Kami berkomitmen memberikan kepastian hukum kepada korban secara adil, transparan, dan humanis,” tegasnya.

Kapolresta Serang Kota Kombes Pol Yudha Satria menyebut kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi perhatian serius. Ia memastikan penanganan perkara melibatkan anak dilakukan hati-hati. Privasi korban tetap dijaga selama proses hukum.

Yudha menegaskan jajaran akan segera mengungkap kasus tersebut. Penanganan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepolisian memastikan pendampingan korban berjalan beriringan dengan penyidikan. “Kita akan segera ungkap kasusnya,” singkatnya.

Penyidik masih mendalami keaslian surat dan klaim keanggotaan poktan. Polisi juga mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Kasus ini menjadi atensi kepolisian. Penyidikan ini berlanjut. “Tentunya semua kasus menjadi atensi kita, apalagi persoalan menyangkut anak,” singkatnya. (MYU/AZM)

PENGUMUMAN LELANG ULANG EKSEKUSI HAK TANGGUGAN
Menunjuk Pengumuman Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan yang terbit tanggal 09 September 2026 pada surat kabar harian banten pos dan pelaksanaan lelang terakhir tanggal 16 September 2026, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pondok Indah akan melaksanakan lelang ulang Eksekusi Hak Tanggungan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan perantara KPKNL Tangerang I, terhadap aset jaminan debitor Akriman Tanjung berupa :

Sebidang tanah dengan Luas 226 M2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri/tertanam di atasnya sesuai SHM No. 04408 m2 atas nama Akriman Tanjung, terletak di Kelurahan/Desa Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan.
(Harga Limit Rp. 606.200.000, Setoran Jaminan Rp. 200.000.000).

- Cara Penawaran : Terbuka, Melalui Internet (<i>Open Bidding</i>)	- Keterangan :
- Pelaksanaan Lelang, Hari/Tanggal : Rabu, 04 November 2026	- Nominal Jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan Nominal jaminan yang disyaratkan.
- Waktu Penawaran : Sejak tanggal di aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran	- Jaminan harus efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- Batas Akhir Penawaran : 04 November 2026, 10.00 WIB (sesuai Waktu Server).	- Pemegang lelang akan dikenakan PPN oleh Penjual sebesar 1.1% dari harga lelang sesuai ketentuan yang berlaku.
- Alamat Domain Lelang : www.lelang.go.id	- Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbank menjadi beban peserta lelang.
- Tempat : KPKNL, Tangerang I, Jl. Taman Makam Pahlawan, Taruna, Kota Tangerang.	
- Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran	
- Bea Lelang Pembeli : 2 % dari harga lelang	
- Pelunasan Harga Lelang : 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang	

Syarat-syarat lelang :

- Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada website tersebut. Objek Lelang dijual apa adanya (as is) sehingga apabila karena sesuatu hal terjadi gugatan, tuntutan, pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Tangerang I & PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Peminat lelang dapat melihat barang yang akan dilelang pada alamat objek lelang mulai pengumuman ini terbit sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pondok Indah 0818601567.

Jakarta, 28 Oktober 2026

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pondok Indah

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUGAN
Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Regional Loan Quality Jakarta 1 akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang II, terhadap barang jaminan (objek lelang) milik debitor atas nama EFENDI berupa :

Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sesuai SHM No. 06983/Saga luas tanah 60 m2 atas nama EFENDI terletak di Blok F.3/16, Desa Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten (d.h. Jawa Barat) (sesuai sertipikat), bertempat dikenal dengan Perumahan Villa Balaraja Blok F.3/16.
(Nilai Limit Rp 334.200.000,-; Penyetoran Jaminan Sebesar Rp 66.400.000,-)

Pelaksanaan Lelang : Cara Penawaran Hari / Tanggal Lelang Waktu Penawaran Batas Akhir Penawaran Alamat Domain Penetapan Pemenang Pelunasan Lelang Bea Lelang Pembeli Tempat Lelang	: Open Bidding (melalui internet) Rabu / 11 November 2026 Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran 11 November 2026 Pukul 10:20 WIB (sesuai waktu server) lelang.go.id Setelah batas akhir penawaran 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang 2% dari harga lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Tangerang II Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna, Kota Tangerang, Provinsi Banten
--	--

Persyaratan Lelang :

- Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website <https://lelang.go.id>. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan".
- Objek lelang dijual dengan ketentuan dan kondisi apa adanya (as is) sehingga apabila karena sesuatu hal terjadi gugatan, tuntutan, pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Tangerang II dan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
- Peserta Lelang wajib menyetor uang jaminan dengan ketentuan jumlah yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan dalam pengumuman ini dan disetor sekaligus (bukan cicil) serta harus efektif diterima KPKNL Tangerang II paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- Uang jaminan harus disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
- Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbank menjadi beban peserta lelang.
- Peserta lelang dapat melihat barang yang dilelang sejak pengumuman ini terbit sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Info dapat menghubungi KPKNL Tangerang II Telp. (021) 53163356, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Consumer Collection Recovery & Asset Sales Division 2, Regional Loan Quality Jakarta 1, Cluster Loan Quality Tangerang 3 Telp. (021) 5353963.



KPKNL TANGERANG II

Tangerang, 28 Oktober 2026

td

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
REGIONAL LOAN QUALITY JAKARTA 1



10 BANTEN POS

Terapkan Closed System dari Hulu ke Hilir
 Pemerintah Bangun
 Sistem Terpadu
 Peternakan dan Pakan



Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman berdialog dengan sejumlah peternak di sela Rapat Koordinasi Kemitraan Jagung Pakan bersama sejumlah perwakilan peternak di seluruh Indonesia di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (27/10).

JAKARTA, BANPOS- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membangun sistem terpadu peternakan dari hulu hingga hilir dengan mengintegrasikan peternak dan petani jagung melalui koperasi guna memperkuat pasokan pakan nasional. Amran menjelaskan, sistem tersebut menyatukan peternak dengan petani jagung dalam satu kelembagaan koperasi sehingga produksi bahan baku pakan dapat direncanakan, dikendalikan, dan memenuhi kebutuhan industri peternakan.

"Kita membangun sistem closed system dari hulu ke hilir. Tidak seperti dulu. Apa maksudnya? Dari hulu kita membangun kelompok tani bersama peternak, peternak dengan petani jagung menjadi satu kesatuan, membentuk koperasi. Jadi tanam jagung sendiri, dibantu oleh pusat," kata Mentan di Jakarta, Selasa (27/10).

Mentan menyampaikan hal itu usai Rapat Koordinasi Kemitraan Jagung Pakan bersama sejumlah perwakilan peternak di seluruh Indonesia di Kantor Kementerian Pertanian.

Dia mengatakan, pemerintah menghitung kebutuhan jagung pakan nasional sekitar 1,8 juta ton per tahun sehingga produksi akan diarahkan mencukupi kebutuhan peternak sekaligus menyediakan cadangan untuk menjaga pasokan. Untuk mendukung sistem ter-

sebut, pemerintah menyiapkan penanaman jagung pada lahan seluas 300.000 hektare dengan produktivitas tujuh ton per hektare guna memperkuat produksi nasional. Lebih lanjut Amran mengatakan, apabila produksi jagung melebihi kebutuhan peternak, Perum Bulog akan berperan sebagai pembeli hasil panen agar kelebihan produksi tetap terserap dan harga petani tetap terjaga. Jagung yang diserap Perum Bulog nantinya dapat dimanfaatkan kembali oleh peternak melalui mekanisme Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ketika pasokan mengalami kekurangan pada masa mendatang.

Selain jagung, pemerintah juga mengendalikan harga bungkil kedelai melalui ID FOOD dengan menetapkan harga Rp8.630 per kilo-gram agar biaya pakan peternak tetap terkendali.

Kebijakan pengendalian bungkil kedelai dilakukan karena harga bahan baku tersebut di pasar sebelumnya mencapai Rp10.000 hingga Rp12.000 per kilogram sehingga berpengaruh terhadap biaya produksi peternakan.

Amran menegaskan, sistem terpadu tersebut menjadi langkah pemerintah menjamin ketersediaan bahan baku pakan, memperkuat peternakan nasional, serta menciptakan ekosistem usaha yang lebih berkelanjutan.(ANT/RUS)

Memperhatikan Pertumbuhan Ekonomi Sebesar 0,5-0,9
 UMP 2027 SESUAI PP
 NOMOR 49 TAHUN 2025



Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memberikan keterangan pers di Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Jakarta, Selasa (27/10).

JAKARTA, BANPOS- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menargetkan pembahasan awal terkait upah minimum provinsi (UMP) tahun 2027 bisa rampung pada akhir November 2026.

"Targetnya, kita punya target minggu terakhir November, Insya Allah. Akhir November, tanggalnya saya lupa persis. Jadi, akhir November itu nanti sudah selesai minimal di level kitanya (evaluasi kementerian)," kata Yassierli saat ditemui di Jakarta, Selasa (27/10).

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pembahasan dan penghitungan terkait UMP 2027 memiliki mekanisme atau tahapan yang harus

dijalani, termasuk bersama Dewan Pengupahan Nasional.

"Terkait UMP, sekali lagi, kita sudah punya mekanismenya. Nanti dibahas di Dewan Pengupahan Nasional, dan nanti juga akan ada berjenjang ke Dewan Pengupahan Daerah," kata Menaker.

Sebelumnya, Yassierli mengatakan pemerintah masih menghitung estimasi kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan UMP 2027.

Selain menghitung estimasi KHL, Kementerian Ketenagakerjaan juga akan membahas formulasi pengupahan bersama Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional dan Dewan

Pengupahan Nasional (Depernas).

Pembahasan tersebut akan mencakup tindak lanjut amanat undang-undang, khususnya mengenai KHL dan survei yang menjadi bagian dari proses penetapan upah minimum.

Adapun besaran UMP 2027 bakal ditetapkan oleh gubernur di masing-masing provinsi dengan mempertimbangkan masukan dari Dewan Pengupahan Provinsi.

Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengatakan, penetapan upah minimum tahun 2027 masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025.

"Penetapan upah minimum

husus untuk tahun 2027 tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025," kata Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan Kemnaker Dhatun Kuswandari kepada ANTARA di Jakarta, Rabu (21/10).

Adapun dalam PP Nomor 49 Tahun 2025, rentang nilai indeks tertentu atau alfa yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,5-0,9.

Formula dasar penghitungan penyesuaian upah minimum dalam peraturan tersebut juga tetap menggunakan variabel inflasi dan pertumbuhan ekonomi.(ANT/RUS)

Danantara Sebut Pembangkit
 Listrik Nuklir Penting bagi
 Ketahanan Nasional

JAKARTA, BANPOS)- Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia mengungkapkan, pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN penting bagi ketahanan energi nasional.

"Yang pertama jelas ketahanan energi, karena PLTN atau nuclear power plant hampir semua negara maju itu, untuk kebutuhan perdamaian atau peace. Bahkan negara seperti Uni Emirat Arab sebagai negara yang kaya minyak dia sudah memiliki nuclear power plant," ujar Managing Director Industrialization Danantara Indonesia Ardy Muawin dalam gelaran Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026, di Jakarta, Selasa (27/10).

Menurut Ardy, salah satu hal paling penting terkait dengan PLTN yakni transfer teknologi, di mana Indonesia tidak hanya menjadi operator atau user dari nuclear power plant, tapi Indonesia juga bisa punya keahlian (mastery) dalam power plant.

"Tadi sudah disampaikan, dulu

Amerika Serikat kirim ke Korea Selatan, Korea Selatan bisa mengembangkan versi terbarunya. Indonesia sendiri sudah punya reaktor nuklir pada tahun 1960an, sebenarnya cita-cita itu sudah ada. Danantara nanti kami bisa menjadi orkestrator setelah regulasinya ada dan pemerintah sudah memutuskan langkah ke depannya," katanya.

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), PLTN sudah menjadi target. Danantara menunggu keputusan pemerintah bagaimana terkait dengan nuclear power plant itu sendiri. Begitu ada keputusan dari pemerintah tentunya Danantara memiliki ekosistem.

"Dari off-taker ada PLN, terus kemudian nanti PLN juga bisa yang nanti mendistribusikan. Tentunya nanti kita juga bisa koordinasi dengan BRIN atau instansi terkait yang memang bidang ini. Jadi kami bisa dari sisi nanti orkestrasi keseluruhan dan juga nanti ke depannya pembiayaan dan juga kemitraan (partnership)," kata Ardy.

Lebih lanjut dia menjelaskan

bahwa PLTN juga menjadi salah satu cantolan untuk teknologi-teknologi turunan, karena banyak industri yang juga terkait dengan teknologi nuklir seperti industri kesehatan (medical).

"Jadi bukan hanya terkait dengan listriknya, tapi transfer teknologi dan industri yang berkembang karena penguasaan teknologi nuklir itu sendiri," ujarnya.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Sripeni Inten Cahyani menyebut energi nuklir berpotensi menjadi "kuda hitam" dalam mempercepat proses dekarbonisasi dan pencapaian target netralitas karbon di Indonesia.

Program pengembangan energi nuklir menjadi semakin relevan lantaran Indonesia membutuhkan sumber energi yang mampu memenuhi permintaan energi industri dan masyarakat sekaligus mendukung upaya mengurangi emisi karbon.

Sripeni mengatakan, sejumlah negara di kawasan ASEAN telah menempatkan nuklir sebagai bagian dari strategi energi jangka panjang. Malaysia dan Filipina dikabarkan mulai masuk ke proyek energi nuklir pada 2031, sementara Vietnam memiliki target pada rentang 2031 hingga 2035.

Menurut dia, Indonesia memiliki modal kuat dalam pengembangan teknologi nuklir untuk energi, baik dari sisi sumber daya manusia dan fasilitas penelitian.

Indonesia punya program pendidikan nuklir di Universitas Gadjah Mada (UGM), sementara fasilitas reaktor nuklir di Serpong, Banten, memiliki kapasitas sekitar 30 megawatt untuk kepentingan penelitian.

Lebih lanjut dia menyampaikan, program pengembangan nuklir saat ini sudah memiliki arah yang konkret melalui identifikasi lokasi dan masuknya rencana pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN periode tahun 2025 hingga 2034.(ANT/RUS)

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) KOTA TANGERANG

BKPSDM Gelar Webinar "Penyegaran Ulang Target Dalam Tugas"

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melalui Platform Government University (Govru) menyelenggarakan webinar pelatihan secara online dengan mengusung tema Penyegaran Ulang Target Dalam Tugas serta untuk memperkuat kinerja dan motivasi ASN (Recharge Your Purpose) pada Jumat, (23/10/2026).

Kegiatan pelatihan yang digelar mulai pada pukul 08.30 WIB – hingga Selesai tersebut diikuti seluruh pegawai ASN se Kota Tangerang dengan Narasumber yang menjadi pembicara adalah Indriyani Virginia, M.Psi., Psikolog (Adolescent and Adult Clinical Psychologist).

Ditemu saat usai membuka acara webinar online, Kepala BKPSDM Jatmiko mengatakan, bahwa, bekerja bukan hanya sekedar menyelesaikan tugas, tetapi juga tentang bagaimana kita menciptakan perubahan dan memberikan dampak nyata. Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), setiap langkah pengabdian memiliki makna dan kontribusi penting bagi kemajuan organisasi serta pelayanan kepada masyarakat.

"Hal tersebut tentunya dengan semangat, inisiatif serta komitmen yang kuat agar kita dapat berkembang dalam meningkatkan kualitas kinerja serta terus menghadirkan berbagai inovasi dalam menjalankan tugas", ujar Jatmiko.

Melalui webinar ini mari kita

temukan kembali makna dari pengabdian, bangun motivasi dan pola pikir kreatif serta jadikan setiap pekerjaan sebagai bentuk kesempatan untuk memberikan kontribusi terbaik.

Menurut nya bahwa para pemimpin hendaknya melakukan pendekatan bukan sekadar memotivasi ASN agar kembali bersemangat bekerja, melainkan mengajak mereka mengevaluasi kembali makna pengabdian, meluruskan orientasi kerja, target kinerja dan menemukan energi baru untuk memberikan pelayanan publik yang lebih bermakna. Ada satu hal yang perlu dikritisi sejak awal recharge tidak selalu berarti menambah motivasi individu.

Bisa jadi ASN kehilangan semangat bukan karena kurang motivasi, melainkan karena rutinitas, lingkungan kerja, kepemimpinan, atau sistem birokrasi yang membuat pekerjaannya terasa kehilangan makna. Setelah selesai webinar online ini maka ASN se Kota Tangerang yang telah hadir dapat mengikuti evaluasi pelatihan atau post test agar memperoleh e-sertifikat pelatihan setara 3 JP (jam pelajaran). (ADV)

Jatmiko
Kepala BKPSDM Kota Tangerang

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, **PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten**, Tbk selaku pemegang Hak Tanggungan akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan penantaran **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang II** terhadap aset debitur/pemjamin hutang atas nama **Muhamad Suhar** berupa :

Satu Bidang tanah berikut bangunan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00904 tanggal 12 Juni 2001, SU. No. 295/Pasanggrahan/2001, Luas 50 m², An. Muhamad Suhar, Terletak di Perumahan Taman Kirana Surya Blok H-11 No.36, Desa Pasanggrahan, Kec. Solear (d.h. Cisoka), Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten

Nilai Limit : Rp. 151.900.000,-
Nilai Jaminan : Rp. 37.975 .000,-

Pelaksanaan Lelang :

Hari : Rabu
Tanggal : 11 November 2026
Waktu : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 11 November 2026 Pukul 10.40 WIB (Sesuai waktu server)
Alamat Domain : lelang.go.id
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang II, Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran

Syarat dan tata cara pelelangan :

1. Penawaran Lelang dilakukan dengan dan tanpa kehadiran peserta penawaran terbuka (**E-Auction Open Bidding**) yang ditayangkan pada domain lelang.go.id Tata cara dapat dilihat pada menu "Prosedur Lelang" dan "Syarat dan Ketentuan" pada domain tersebut.

2. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada lelang.go.id dengan merekam dan mengunggah softcopy KTP, NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut).

3. Peserta lelang wajib menyotir uang jaminan dengan ketentuan jumlah yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan dalam pengumuman lelang ini, dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil) serta harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Tangerang II selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.

4. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor **Virtual Account (VA)** masing-masing peserta lelang yang dapat dilihat pada menu status lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan sesuai dokumen yang diberikan;

5. Harga penawaran belum termasuk bea lelang sebesar 2% dan pengkangan pajak / denda apabila ada, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di negara Republik Indonesia;

6. Pemenang lelang harus melunasi kewajibannya paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak dinyatakan sebagai pemenang lelang, apabila tidak dilunasi uang jaminan akan disetor ke Kas Negara sebagai Pendapatan Jasa Lainnya;

7. Peserta lelang diwajibkan melihat, mengetahui, dan menyetujui aspek legal dari objek yang dilelang, sesuai apa adanya (kondisi **as is**);

8. Lelang dapat dibatalkan sesuai ketentuan dan peserta lelang tidak berhak menuntut ganti rugi atau tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Tangerang II dan atau Bank BJB Cabang Kabupaten Tangerang;

9. Keterangan lebih lanjut hubungi Bank BJB Cabang Kabupaten Tangerang Telepon 021-23670700 (**PIC : Ferry Hp. 08562109029 dan Andy Hp. 087771787654**) atau KPKNL Tangerang II Telepon 021-55771197.

Tangerang, 28 Oktober 2026
PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
Cabang Kabupaten Tangerang

bank bjb
Cabang Kabupaten Tangerang



BANPOS CHANNEL



WWW.BANPOS.CO



BANTENPOS@GMAIL.COM



BANTEN_POS



BANTEN POS

WARGA PESISIR UTARA DIMINTA WASPADA POTENSI ROB

TANGERANG, BANPOS - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang, meminta agar masyarakat di wilayah pesisir utara (pantura) untuk mewaspadaai terjadinya fenomena rob atau air pasang dengan kapasitas besar yang menyebabkan bencana banjir.

"Oleh karena itu imbauan kami, diadakan semacam ronda, artinya bergantian, tanggung jawab bersama. Karena kan air kita tidak tahu ketinggiannya sampai sejauh mana. Tetap harus ada antisipasi, bagaimana kalau ini terjadi rob lebih tinggi, jadi tetap harus ada ronda," ujar Kepala BPBD Kabupaten Tangerang Achmad Taufik di Tangerang, Selasa (27/10).

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kata dia, menyebutkan ancaman banjir rob ini terjadi karena fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan baru.

Hal itu juga diperkuat sistem pemantauan banjir rob DKI Jakarta yang memprediksi terjadi potensi ketinggian air laut di sejumlah kawasan pesisir pada 25 sampai 31 Oktober 2026.

Oleh karena itu masyarakat diminta meningkatkan kesiagaan dan kewaspadaan dalam menghadapi bencana alam yang melanda pesisir utara Kabupaten Tangerang.

"Jadi terkait dengan bencana banjir rob, ini sudah dibilang terjadi setiap tahun, artinya sering terjadi berulang-ulang. Hanya memang kesiapan kami di BPBD, dalam hal ini Pemda Kabupaten



Kepala BPBD Kabupaten Tangerang, Achmad Taufik memberikan keterangan resmi terkait potensi kebencanaan kepada awak media di Tangerang, Banten.

Tangerang, sudah siap menghadapi rob," ucap Achmad Taufik.

Ia menegaskan kesiapan personel serta logistik dalam menghadapi potensi bencana tersebut. Langkah antisipasi ini dilakukan dengan menyesuaikan karakteristik dan variasi banjir umumnya memiliki siklus pasang surut harian atau sebaliknya.

Kendati mengakui adanya keterbatasan sarana dan prasarana di lapangan, namun dia memastikan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan logistik BPBD Kabupaten Tangerang tetap optimal dalam melayani masyarakat yang terdampak.

Untuk untuk prediksi waktu kejadian, pihaknya masih terus berkoordinasi dan memantau pemutakhiran data cuaca dari BMKG.

"Kami tetap mengacu kepada BMKG. Namun kita ketahui bersama bahwa Tangerang itu juga berbatasan dengan DKI Jakarta. Bisa juga sama dan bisa juga berbeda, tergantung posisi daratannya, khususnya daerah pesisir Teluknaga, Mauk, dan sekitarnya," kata Achmad Taufik.

Berdasarkan hasil pemetaan dan kajian risiko bencana oleh BPBD Kabupaten Tangerang, wilayah yang menjadi langganan terdampak banjir rob adalah kawasan permukiman yang berada di sekitar garis pantai utara.

"Wilayah itu meliputi Kecamatan Kosambi, Teluknaga, Mauk, serta Kronjo yang berbatasan langsung dengan laut," ucap Achmad Taufik.(ANT/RUS)



Walikota Sachrudin membuka Festival Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) di Plaza Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Selasa (27/10)

Walikota: Generasi Sehat Bergizi jadi Modal Bangun Masa Depan

TANGERANG, BANPOS - Walikota Tangerang Sachrudin mengatakan masa depan kota tak hanya dibangun dengan infrastruktur, tetapi juga modal generasi yang sehat dan bergizi sebagai investasi penting untuk melahirkan anak-anak yang cerdas, berkualitas, dan berdaya saing.

"Kita harus memikirkan masa depan dan generasi penerus. Makanan yang disajikan bukan hanya untuk membuat kenyang, tetapi juga harus bergizi dan seimbang. Banyak bahan pangan lokal yang bisa diolah menjadi makanan dengan kandungan gizi yang baik," ujar dia saat membuka Festival Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) di Plaza Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Selasa (27/10).

Ia menegaskan pemenuhan gizi bukan sekadar menyediakan makanan untuk menghilangkan rasa lapar, melainkan memastikan setiap asupan mendukung kesehatan dan tumbuh kembang. Kesadaran memilih dan mengolah pangan bergizi, kata dia, perlu dibangun mulai dari lingkungan keluarga dan sejak dini.

Menurut dia, kecukupan gizi berperan penting dalam mendukung pertumbuhan fisik, kemampuan belajar, dan kualitas sumber daya manusia.

Edukasi mengenai pola konsumsi pangan sehat, katanya, perlu terus diperluas agar menjadi kebiasaan sehari-hari masyarakat.

"Harapannya, anak-anak kita dapat tumbuh dan berkembang

dengan baik. Bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga cerdas, sehingga kelak mampu meraih masa depan yang lebih baik dan hidup bahagia serta sejahtera," katanya.

Terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat, Sachrudin menyatakan dukungan Pemerintah Kota Tangerang melalui penguatan edukasi pangan yang sejalan dengan semangat B2SA.

Kedua upaya tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni mendukung pemenuhan gizi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

"Program MBG harus kita dukung dan selaraskan dengan program di daerah. Yang terpenting, makanan yang dikonsumsi benar-benar memenuhi kebutuhan gizi secara seimbang," katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa pemenuhan gizi tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya makanan, tetapi oleh keseimbangan asupan sesuai kebutuhan tubuh.

Masyarakat perlu memahami pentingnya mengonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman.

"Pembangunan bukan hanya tentang gedung yang megah atau infrastruktur yang baik. Kita juga harus membangun manusianya. Sebab, kualitas sumber daya manusia sangat berkaitan dengan pemenuhan gizi. Makanan harus cukup, tidak berlebihan, dan yang paling penting, seimbang," demikian Sachrudin.(ANT/RUS)

DKP Bantu Pompa Air

Jaga Produksi Kelompok Tani di Musim Kemarau

TANGERANG, BANPOS 6 Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang, mendistribusikan bantuan pompa air kepada kelompok tani (poktan) dan kelompok wanita tani (KWT) untuk menjaga produksi di musim kemarau.

"Hasilnya, sejumlah komoditas alternatif seperti melon lokal kini berhasil dibudidayakan langsung oleh KWT di Kota Tangerang," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Tangerang Muhdorun di Puspemkot Tangerang, Selasa (27/10).

Ia mengatakan, upaya Pemkot

Tangerang dalam mendorong masyarakat untuk melaksanakan ketahanan pangan terus digencarkan, khususnya menghasilkan pangan bergizi dan tidak bergantung sepenuhnya pada beras.

Apalagi luas lahan sawah produktif di Kota Tangerang saat ini tersisa sekitar 88 hektare dengan produksi kurang lebih 700 ton per tahun, yang masih jauh dari kebutuhan tahunan masyarakat.

"Konsumsi beras kita masih cukup tinggi yaitu sekitar 72 kilogram per kapita per tahun, sementara umbi-umbian seperti ubi jalar baru sekitar 3,19 kilogram per orang per tahun. Padahal, sumber karbohidrat sangat beragam, mulai dari umbi-umbian, pisang, hingga sukun yang dapat tum-

buh subur di pekarangan rumah di Kota Tangerang," katanya.

Tak hanya masyarakat, DKP juga memperkuat edukasi di lingkungan sekolah dengan membentuk kader anak sehat (KAS). Para pelajar pilihan ini dilatih untuk menjadi penggerak bagi teman sebaya agar lebih selektif dalam memilih jajanan sehat yang bebas dari bahan kimia berbahaya seperti pewarna tekstil atau pengawet buatan.

"Melalui sinergi lintas sektor ini, kami berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pangan lokal semakin meningkat, sehingga ketahanan pangan daerah semakin tangguh dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara

berkelanjutan," katanya.

Wali Kota Tangerang Sachrudin menyampaikan, pemenuhan gizi seimbang sangat krusial bagi tumbuh kembang anak, baik dari aspek kesehatan fisik maupun kemampuan berpikir dalam proses belajar mengajar.

Program Pangan B2SA yakni Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman adalah langkah Pemkot Tangerang dalam memikirkan masa depan generasi penerus.

"Kita ingin masyarakat menyajikan makanan bukan hanya sekadar kenyang, tetapi juga bergizi dan seimbang agar anak-anak kita tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia," ujar Sachrudin.(ANT/RUS)

Hindari Penagihan Kredit di Lapangan

Konsumen Diimbau Ajukan Restrukturisasi

TANGERANG, BANPOS - Perusahaan pembiayaan kredit kendaraan mengimbau konsumen yang mengalami kendala pembayaran angsuran agar segera mendatangi kantor cabang terdekat untuk mengajukan restrukturisasi kredit mencegah perselisihan serta penagihan di lapangan.

Direktur BFI Finance, Iwan, menjelaskan konsumen yang mengalami kesulitan ekonomi tidak perlu menghindari perusahaan pembiayaan. Konsumen didorong untuk berkomunikasi secara terbuka dengan pihak perusahaan agar dapat mencari solusi sesuai kondisi dan ketentuan yang berlaku.

"Kalau memang ada permasalahan dengan angsuran, datanglah ke perusahaan pembiayaan. Kami memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mengajukan restrukturisasi. Konsumen harus menyampaikan permasalahannya sehingga bisa dicari solusi," ujar Iwan dalam acara keterangan pers kepada media di Serpong, Selasa (27/10).

Ia menjelaskan, restrukturisasi dapat dipertimbangkan bagi konsumen yang mengalami kesulitan ekonomi, selama kendaraan masih berada dalam penguasaan konsumen dan tidak dialihkan kepada pihak lain. Pengajuan tersebut akan dievaluasi berdasarkan kondisi dan permasalahan yang dihadapi konsumen.

Menurut dia, perusahaan tidak

serta-merta melakukan penarikan kendaraan ketika konsumen mengalami tunggakan. Sebelum proses penanganan lebih lanjut, perusahaan melakukan pendekatan dan memberikan surat peringatan sesuai prosedur.

Iwan mengatakan, perusahaan pada prinsipnya menangani permasalahan pembayaran melalui tim internal terlebih dahulu. Keterlibatan profesional kolektor eksternal umumnya dilakukan ketika konsumen dan kendaraan tidak lagi dapat ditemukan, terutama pada kasus tunggakan yang telah berlangsung lebih dari tiga bulan.

Karena itu, ia meminta konsumen tidak bersikap menghindari ketika menghadapi kesulitan pembayaran. Komunikasi langsung dengan perusahaan dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah persoalan berkembang menjadi konflik.

Selain mengimbau konsumen untuk mengajukan restrukturisasi, Iwan menekankan pentingnya memastikan legalitas profesional kolektor yang melakukan penagihan atau penanganan kendaraan.

Jika bertemu profesional kolektor di jalan, konsumen berhak meminta petugas menunjukkan kartu identitas atau ID card, surat tugas, serta bukti sertifikasi yang dipersyaratkan.

Menurut Iwan, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama untuk memastikan kegiatan penanganan kendaraan dilakukan oleh petugas yang memiliki kewenangan dan mengikuti prosedur.



Direktur BFI Finance, Iwan saat menjelaskan mengenai sistem kerja profesional kolektor eksternal dalam melakukan proses penagihan terhadap konsumen yang alami kredit macet.

"Setiap konsumen yang bertemu dengan profesional kolektor harus menanyakan surat tugas dan identitasnya. Kalau memang benar petugas yang mendapat penugasan, seharusnya mereka bisa menunjukkan dokumen tersebut," katanya.

Ia juga memperbolehkan konsumen mendokumentasikan surat tugas yang ditunjukkan petugas untuk memastikan keabsahan penugasan tersebut. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau situasi yang berpotensi menimbulkan keributan, Iwan menyarankan agar komunikasi dilanjutkan di kantor cabang terdekat, bukan berdebat di jalan.

"Kalau bertemu di jalan, sebaiknya komunikasinya diarahkan ke kantor. Di kantor, permasalahan bisa dibicarakan dengan lebih baik dan dicari penyelesaian sehingga tidak me-

nimbulkan salah paham," ujarnya. Iwan juga mengingatkan konsumen agar tidak memberikan uang dalam bentuk apa pun kepada profesional kolektor, baik untuk pembayaran angsuran, uang jasa, maupun alasan lain yang mengatasnamakan perusahaan.

Ia menegaskan bahwa profesional kolektor yang mendapat penugasan dari perusahaan tidak diperbolehkan menerima pembayaran dari konsumen. Tugas mereka adalah menjalankan penanganan sesuai surat penugasan, termasuk mengarahkan konsumen untuk datang ke kantor perusahaan pembiayaan.

"Profesional kolektor tidak boleh menerima uang satu rupiah pun atas nama apa pun, termasuk pembayaran angsuran. Pembayaran resmi harus dilakukan melalui saluran pembayaran perusahaan," tegasnya.(ANT/RUS)